

336.2  
SDE  
v 21

**KONTRIBUSI TAX EFFORT, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ( BBNKB)  
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
JAWA TENGAH  
PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH ( UPPD )  
KABUPATEN BLORA**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro**

**Program Studi : Magister Ilmu Administrasi**

**Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan oleh:

Nama : SOEKRISTIONO

NIM : D4E002016

**Kepada**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
2003**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| UPT-PUSTAK-UNDIP |                 |
| No. Daft:        | 2165/171 MPA/14 |
| Tgl.             | ...3 Feb'04     |


**KONTRIBUSI TAX EFFORT, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR ( BBNKB) DALAM PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH JAWA TENGAH PADA UNIT  
PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD ) KABUPATEN BLORA**

dipersiapkan dan disusun oleh  
SOEKRISTIONO  
D4E002016

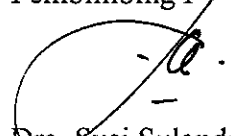
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 7 September

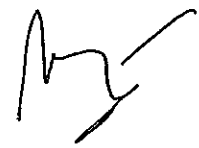
Susunan Tim Penguji

Anggota Tim Penguji lain :

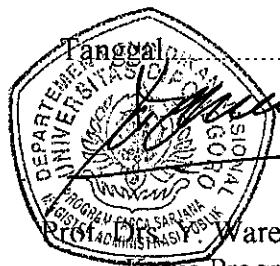
  
Drs. Ali Mufiz, MPA  
Pembimbing I

  
Drs. Yusmilarso, MA

  
Dra. Susi Sulandari, MSi  
Pembimbing II

  
Dra. M. Suryaningsih, MS

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister



Warella, MPA, PhD  
Ketua Program Studi

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang , September 2003



Soekristiono

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“KONTRIBUSI TAX EFFORT, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH JAWA TENGAH PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) KABUPATEN BLORA “**

Tesis ini kami susun sebagai tugas akhir yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa pascasarjana untuk mencapai gelar sarjana S2 pada Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun penyajian materinya, namun dalam hal ini penulis berusaha semaksimal mungkin yang terbaik. Penulis terbuka dan berharap bila ada kritikan atau saran yang membangun sehingga dapat lebih menyempurnakan tesis ini di kemudian hari .

Dalam penulisan tesis ini penyusun banyak mendapat bimbingan maupun bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Prof. Y. Warella, MPA, PhD selaku ketua program pasca sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. Ali Mufiz, MPA selaku pembimbing I
3. Ibu Dra Susi Sulandari, MSi, selaku pembimbing II

4. Seluruh anggota Dewan Penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis demi sempurnanya penulisan tesis ini
5. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah
6. Seluruh staf administrasi Magister Administrasi Publik Undip Semarang yang senantiasa membantu penulis selama studi .
7. Seluruh staf UPPD Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Blora
8. Rekan – rekan seangkatan Mahasiswa Magister Administrasi Publik Undip Semarang

Akhir kata penulis berharap semoga Tuhan memberikan balasan yang sepadan dengan kebaikan yang telah diberikan dari semua pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, September 2003

Penyusun

## RINGKASAN

Tuntutan masyarakat terhadap reformasi khususnya birokrasi agar aparat pemerintah semakin akuntabel dan efisien, sehingga dapat meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, hal tersebut harus diwujudkan dalam suatu sistem dimana anggaran pendapatan diharapkan terus dapat meningkatkan tanpa banyak membebani masyarakat disertai anggaran belanja yang lebih berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara langsung dengan prinsip efisien, tepat sasaran serta tepat manfaat.

Gejala dimaksud membawa konsekuensi bagi Dipenda sebagai unsur pelaksana Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dibidang Pendapatan Daerah, untuk menyerap semua aspirasi yang berkembang secara bijak dan penuh optimisme, dengan mengaplikasikan program peningkatan PAD secara gradual disertai pemberdayaan segenap potensi yang ada serta didukung Program Anggaran Belanja yang proporsional dan terus diupayakan peningkatannya pada sektor pelayanan publik.

Kelesuan pasar kendaraan bermotor yang diperkirakan sebagai dampak dari perekonomian dalam negeri yang berfluktuasi dan pengaruh AFTA 2003 yang cukup kental, merupakan fenomena yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian rencana Anggaran Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2003 ini, yang pada hakekatnya 70 % didukung dari Pajak Daerah (PKB/BBNKB).

Dengan demikian Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak Dinas dilapangan, dituntut untuk terus komit terhadap Visi dan Misi Dipenda, dengan mencermati dan mengantisipasi setiap peluang dan tantangan untuk tercapainya sasaran yang telah ditentukan Dinas. Tugas dari utama dari UPPD sebagai lembaga teknis Dipenda . antara lain :

1. Penetapan target pendapatan yang realities sesuai dengan potensi riil.

2. Meningkatkan PAD dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru, melestarikan dan mengembangkan sumber-sumber PAD yang ada untuk mewujudkan desentralisasi fiskal guna mengurangi ketergantungan Pemerintah Pusat.
3. Memobilisir potensi sumber daya masyarakat secara berkelanjutan adil dan merata.
4. Menindaklanjuti ketentuan Perpajakan dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam UU. Nomor 34 Tahun 2000.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat untuk memacu Pendapatan Daerah.

Dalam rangka untuk mengetahui sekaligus mengantisipasi kondisi yang diinginkan dapat teraktualisasi di bidang Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang pemenuhan dan peningkatannya tertumpu pada kinerja UPPD sebagai ujung tombak operasional Dinas, dapat dicermati dari seberapa jauh rencana anggaran ( Target ) dapat direalisasikan serta seberapa besar peningkatan kinerja tahun berjalan dibanding kinerja tahun lalu untuk periode yang sama.

Dari hasil evaluasi sementara capaian pendapatan daerah serta realisasi anggaran belanja selama lima tahun ( 1997 – 2001 ) , upaya UPPD Kabupaten Blora dalam mendapatkan PAD Propinsi Jawa Tengah melalui Upaya Pajak ( Tax Effort ), Hasil Guna ( Efektivitas ) dan Daya Guna ( efisiensi ) Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) memperlihatkan prosentase yang tinggi dan rata – rata tiap tahun mengalami fluktuasi peningkatan yang signifikan.

Mengingat sangat pentingnya anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi daerah, maka pada alangkah awalnya, yaitu pada perencanaan dan penyusunannya harus mendapat perhatian dan pertimbangan yang lebih seksama dengan mengingat berbagai potensi dan kendala yang ada, sehingga

dalam pelaksanaannya akan dapat memenuhi sasaran target yang ditentukan. Dari adanya beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, maka perlu diperhatikan upaya untuk menghilangkan / meminimalkan kendala – kendala yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut, sehingga hal tersebut diharapkan tidak terjadi lagi.



## ABSTRAK

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah ( UPPD ) sebagai ujung tombak Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah mempunyai peran penting dalam memberikan kontribusi pada perolehan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Peningkatan PAD pada Propinsi Jawa Tengah diupayakan melalui pemberdayaan segenap potensi yang dimiliki daerah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah proporsi Anggaran Belanja yang memperhatikan juga peningkatan pelayanan pada sektor publik. Melihat perkembangan yang terjadi terhadap potensi pendapatan melalui pajak terutama di Kabupaten Blora, dari perbandingan perolehan daerah melalui pajak, Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) memiliki prosentase sekitar 70 % dari seluruh pajak yang ada . Kontribusi PKB dan BBNKB ini didukung oleh adanya upaya pajak, efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh UPPD dalam hal ini yang tercakup dalam wilayah kerja Kabupaten Blora. Dari hasil sementara, capaian pendapatan daerah serta realisasi anggaran belanja selama lima tahun ( 1997 – 2001 ) pada UPPD Kabupaten Blora, tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan melalui upaya , efektivitas dan efisiensi PKB dan BBNKB. Pendapatan yang diperoleh pada UPPD Kabupaten Blora melalui kontribusi terhadap peningkatan PAD Propinsi Jawa Tengah memberikan gambaran adanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Dalam pelaksanaan upaya peningkatan PAD melalui penggalan pajak dengan memberdayakan potensi pajak, dalam hal ini PKB dan BBNKB, agar lebih diarahkan pada kegiatan perencanaan dan penyusunan kegiatan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengoptimalisasian dan penyesuaian antara pendapatan yang diterima dengan pengeluaran daerah. Penerimaan pendapatan yang diperoleh UPPD Kabupaten Blora, memberikan prospek yang bisa diharapkan dalam meningkatkan PAD terutama perolehan dari PKB dan BBNKB. Perkembangan dari tahun ke tahun memberikan indikasi pada perspektif pendapatan Kabupaten Blora yang cukup potensial dan prospektif. Melihat kondisi ini penting sekali dilakukan terus – menerus upaya pajak, pemantapan efektivitas pajak serta pemanfaatan pajak secara efisien dengan harapan dapat memperoleh PAD yang cukup tinggi . Dengan penerimaan PAD yang tinggi ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan khususnya di daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Kata kunci : Kontribusi Upaya Pajak, Efektivitas, Efisiensi, Peningkatan PAD

## ABSTRACT

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) as a main part of Dinas Pendapatan Daerah of Central Java Province play a significant role in contributing to Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD improvement in Central Java Province was achieved by empower all local potential. Particularly interesting was expenditures budget proportion to service improvement in public sector. By looking the development of earning potential by taxes, especially in Kabupaten Blora, by comparison, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) and Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) contribute about 70% of all taxes. These PKB and BBNKB contributions were supported by tax efforts, effectivity and efficiency by UPPD in Kabupaten Blora. From tentative results, local earning achievement and expenditure budget realization for five years (1997-2001) in UPPD Kabupaten Blora, had significant improvement every year by efforts, effectivity and efficiency of PKB and BBNKB. The income in UPPD Kabupaten Blora by contribution toward PAD improvement of Central Java Province give a picture about development of community wealth. In an effort to increase PAD by tax and tax potential empowerment such as PKB and BBNKB, it is important to directed toward activities planning and scheduling. The aim is to optimize and balancing between income and expenditure. The income from UPPD Kabupaten Blora, have a prospect to increase PAD mainly income from PKB and BBNKB. The development from year to year give an indication about potential and prospect of income by Kabupaten Blora. The tax efforts must be sustained to get high PAD. With high PAD, it is hoped that it can be used to local community development, particularly to improve public service.

**Keywords:** Tax Efforts Contribution, Effectivity, Efficiency, PAD improvement

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL  |         |
| LEMBAR PENGESAHAN                                    | ii      |
| PERNYATAAN   | iii     |
| KATA PENGANTAR                                       | iv      |
| RINGKASAN  | vi      |
| ABSTRAK  | ix      |
| ABSTRACT   | x       |
| DAFTAR ISI   | xi      |
| DAFTAR GAMBAR  | xiii    |
| DAFTAR TABEL   | xiv     |
| <br>BAB I      PENDAHULUAN                           | <br>1   |
| A. Latar Belakang                                    | 1       |
| B. Identifikasi dan Perumusan Masalah                | 7       |
| C. Tujuan Penelitian                                 | 9       |
| D. Kegunaan Penelitian                               | 10      |
| <br>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA                     | <br>11  |
| A. Landasan Teori                                    | 11      |
| B. Rencana Tindakan Peningkatan Pendapatan Daerah    | 18      |
| C. Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama |         |
| Kendaraan bermotor      (BBNKB)                      | 25      |
| C.1. Upaya Pajak ( Tax Effort )                      | 33      |
| C.2. Hasil Guna ( Effectivity )                      | 36      |
| C.3. Daya Guna ( Efisiensi )                         | 40      |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| BAB III. | METODOLOGI PENELITIAN                                      | 43  |
|          | A. Rancangan Penelitian / Perspektif Pendekatan Penelitian | 43  |
|          | B. Fenomena Yang Diamati                                   | 44  |
|          | B.1. Kerangka Konsep                                       | 45  |
|          | B.2. Definisi Konsep                                       | 46  |
|          | C. Lokasi Penelitian                                       | 47  |
|          | D. Pemilihan Subjek Atau Informan                          | 47  |
|          | E. Jenis Sumber Data                                       | 49  |
|          | E.1. Data Primer   | 49  |
|          | E.2. Data Sekunder   | 49  |
|          | F. Metode Pengumpulan Data                                 | 49  |
|          | G. Analisa Data  | 50  |
| <br>     |  |     |
| BAB IV.  | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN                            | 55  |
|          | A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian                         | 55  |
|          | B. Hasil Penelitian  | 81  |
|          | C. Analisis hasil Penelitian                               | 117 |
|          | D. Diskusi   | 149 |
| <br>     |  |     |
| BAB V.   | SIMPULAN DAN SARAN   | 152 |
|          | A. Simpulan  | 152 |
|          | B. Saran   | 155 |

## DAFTAR PUSTAKA

## ARTI ISTILAH

## PEDOMAN WAWANCARA

## LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Gambar 1 | <i>Tax Effort</i> Efektifitas dan efisiensi dalam peningkatan PAD | 45 |
| Gambar 2 | Bagan Organisasi UPPD pada Dipenda Propinsi Jawa Tengah           | 62 |

## DAFTAR TABEL

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| Tabel 1  | Matrik Potensi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah  | 21  |
| Tabel 2  | Standart Penerimaan Pendapatan   | 24  |
| Tabel 3  | Perkembangan PAD Propinsi Jawa Tengah  | 67  |
| Tabel 4  | Perkembangan PAD Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997/<br>1998 – 2001                               | 77  |
| Tabel 5  | Kontribusi PAD dan Bagi Hasil Terhadap APBD<br>Propinsi JATENG Th. 1997/1998 – 2001            | 78  |
| Tabel 6  | Kegiatan Penduduk Kabupaten Blora<br>Usia 10 Tahun Ke atas                                     | 82  |
| Tabel 7  | Penduduk Kabupaten Blora berumur 10 Tahun Keatas<br>( Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 )      | 84  |
| Tabel 8  | PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstans 1994<br>Serta Perkembangannya ( Kab. Blora Th. 1994 – 2002 ) | 89  |
| Tabel 9  | Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2002   | 100 |
| Tabel 10 | Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2002  | 102 |
| Tabel 11 | Penerimaan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2002   | 103 |
| Tabel 12 | Upaya Pajak ( <i>Tax effort</i> ) PKB Th. 1997 – 2001  | 118 |
| Tabel 13 | Upaya Pajak ( <i>Tax Effort</i> ) BBNKB Th. 1997 – 2001  | 119 |
| Tabel 14 | Hasil Guna ( Efektivitas) PKB Th. 1997 – 2001  | 122 |
| Tabel 15 | Hasil guna ( Efektivitas ) BBNKB Th. 1997 – 2001   | 123 |
| Tabel 16 | Daya Guna ( Efisiensi) PKB Th. 1997 – 2001   | 126 |
| Tabel 17 | Daya Guna ( Efisiensi) BBNKB Th. 1997 – 2001   | 127 |

# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **A. Latar Belakang**

Arus globalisasi dan regionalisasi perekonomian yang muncul selama ini akan berdampak baik positif maupun negatif pada perekonomian nasional yang pada akhirnya memberi pengaruh pada kondisi perekonomian suatu daerah. Fenomena perekonomian yang demikian ini cenderung menuntut adanya peran aktif dari eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjadikan kondisi tersebut bukan saja sebagai suatu "*tantangan*" namun juga "*kesempatan*" bagi daerah untuk mengambil prakarsa dan konsolidasi secara dini, bertahap, dan berkelanjutan guna mengembangkan pemerintahan yang mampu, mandiri dan terpercaya. Dengan kata lain pemerintah daerah dituntut lebih banyak dalam menggali potensi ekonomi daerahnya, dan memainkan peranan yang besar dalam merangsang aktivitas ekonomi daerah untuk meningkatkan dan membina kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu Pamudji (1982:62) mengatakan bahwa :

"Keuangan daerah inilah-yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, kemampuan dalam arti sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya guna membiayai

keperluan-keperluan sendiri tanpa semata-mata menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi pemerintah pusat”.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Koswara (2000:50) bahwa :

“Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara”.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi terletak pula pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melalui Unit Pelayanan Pendapatan Daerah ( UPPD ) Kabupaten / Kota dengan kewenangannya dituntut lebih banyak dalam menggali potensi perekonomian daerahnya. Untuk mewujudkan itu, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah ( UPPD Kabupaten / Kota ) dituntut adanya kemampuan manajerial pengelolaan keuangan dalam menggali potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud



adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil akan dapat mengumpulkan dana dari masyarakat bagi pembiayaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Dengan dana ini, pemerintah daerah terutama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah akan dapat menyediakan *social overhead capital* yang memadai. Keberadaan *social overhead capital* dapat menentukan pula keberhasilan daerah dalam diversifikasi produk, perluasan perdagangan, mendukung perkembangan penduduk, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan kondisi lingkungan hidup masyarakatnya. Bagi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, sumber-sumber penerimaan yang tersedia untuk pembiayaan seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tersebut haruslah bersumber dari potensi daerah sendiri. Dengan kata lain keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu (Weiss, 1995:323).

Namun pada sisi lain, dengan masih terlihat banyaknya pengarahan-pengarahan, perintah-perintah, target-target dan rencana-rencana dari pemerintah pusat yang dibebankan pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

( UPPD ) Kabupaten/Kota telah menjadikan inisiatif dan otoritas daerah dalam penggunaan dana tersebut menjadi sangatlah terbatas. UPPD Kabupaten/Kota hanya diberikan kewajiban dan ketaatan pada aturan yang menjadi media pengawasan pusat terhadap keputusan-keputusan pemerintah propinsi.

Pada bidang pelayanan publik, persoalan utama terletak pada kenyataan bahwa pemerintah pusat secara terus menerus masih mengintervensi secara *Ad Hoc* kepentingan-kepentingan UPPD dengan alasan melaksanakan pelayanan pendapatan yang lebih umum. Hal ini khususnya terjadi pada pemberian proyek-proyek bantuan pemerintah pusat yang sama sekali tidak memberikan kesempatan pada pemerintah daerah untuk memilih kebutuhannya sesuai dengan skala prioritas.

Kondisi demikian sudah barang tentu telah membatasi kesempatan kepada UPPD Kabupaten/Kota dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan rencana kerja dan potensi yang dimiliki serta kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pendapatan di daerah. Prosedur kerja seperti itu, menggambarkan bagaimana dana-dana pemerintah pusat yang dialokasikan dan diawasi telah menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan pendapatan UPPD Kabupaten/Kota yang pada akhirnya akan mempersempit ruang lingkup otoritas UPPD Kabupaten / Kota yang sebenarnya.

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 1997 yang mengalokasikan sebagian besar jenis-jenis pajak yang “gemuk” bagi pemerintah pusat merupakan salah satu penyebab keterbatasan kemampuan UPPD Kabupaten / Kota dalam menggali sumber-sumber penerimaan. Kondisi semacam ini jelas tidak akan mampu mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi sebagai daerah otonom sebagaimana yang diharapkan. Padahal penyelenggaraan Otonomi itu sendiri perlu diimbangi dengan kemampuan menggali dan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pelayanan pendapatan daerah sesuai dengan prioritas dan preferensi UPPD Kabupaten/ Kota.

Dari aspek keuangan daerah, arah pengembangan kemandirian keuangan UPPD Kabupaten / Kota pada prinsipnya mencakup 2 (dua) dimensi penataan sektor publik, yaitu penataan aspek pendapatan (*revenue side*) dan aspek pengeluaran (*expenditure side*). Dengan memfokuskan aspek yang pertama, upaya penataan pendapatan daerah memang dihadapkan pada persoalan yang dilematis. Di satu pihak UPPD Kabupaten / Kota dituntut untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, di lain pihak kemandirian akan kemampuan keuangan UPPD Kabupaten / Kota secara nyata masih sangat terbatas yang tercermin dari masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD tiap tahunnya.

Sejalan dengan itu, salah satu hal penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah sebagai upaya

mengurangi ketergantungan keuangan daerah adalah dengan mengupayakan peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui UPPD Kabupaten / Kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Tengah termasuk di dalamnya UPPD Kabupaten Blora.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PK.B) dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diharapkan akan mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah yang potensial, karena sebagian besar pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Jawa Tengah akan didukung dari penerimaan pajak tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, sudah sewajarnya dan perlu bahwa sistem administrasi dan sistem pemungutan (*collecting system*) pajak daerah, khususnya PKB dan BBNKB untuk dianalisis dan diketahui seberapa besar sebenarnya sumber atau potensi PKB dan BBNKB yang dapat atau harus dibayarkan, selain mengetahui cara penarikan yang tepat dan rumus penetapan besarnya pajak yang harus dipungut.

Menyadari begitu kompleksnya faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah

terutama penerimaan yang berasal dari PKB dan BBNK.B itu, perlu kiranya dilakukan studi penelitian terhadap permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor “*yang tidak dapat dikendalikan*” terutama terhadap indikator upaya pajak, hasil guna (*efektivitas*) pajak, dan daya guna (*efisiensi*) pada PKB dan BBNKB.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Kelemahan dan permasalahan yang terjadi pada upaya penerimaan daerah Propinsi Jawa Tengah, apabila dicari jalan keluarnya tentu akan menyangkut berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini hanya memfokuskan pada faktor-faktor yang dianggap dominan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah, yang meliputi upaya pajak (*tax effort*), hasil guna (*efektivitas*) pajak, dan daya guna (*efisiensi*) pajak pada PKB dan BBNKB terutama di wilayah yuridiksi UPPD Kabupaten Blora.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permasalahan yang terdapat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah, diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya upaya pajak daerah terutama PKB dan BBNKB pada UPPD kabupaten Blora sebagai akibat dari fluktuasi perkembangan

ekonomi daerah Kabupaten Blora pasca reformasi yang terlihat pada PDRB Kabupaten Blora atas dasar harga konstan.

2. Rendahnya hasil guna (*efektivitas*) PKB dan BBNKB sebagai akibat dari masih besarnya angka tunggakan pajak dan denda pajak yang berakibat pada rendahnya hasil pungut pajak dari potensi pajak yang dipungut dalam wilayah yuridiksinya.
3. Tingginya biaya pemungutan pajak pada UPPD Kabupaten Blora apabila dibandingkan dengan hasil pungutan pajak yang diperoleh atau dipungut dalam wilayah yuridiksinya.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Sejauhmana upaya pajak (*tax effort*), hasil guna (*efektivitas*), dan daya guna (*efisiensi*) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD Kabupaten Blora dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah ?.
2. Bagaimana kontribusi dan perkembangan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Blora ditinjau dari sisi penerimaan dalam upaya peningkatan PAD Propinsi Jawa Tengah?.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Melakukan analisis terhadap perkembangan upaya pajak (*tax effort*), hasil guna (efektivitas), dan daya guna (efisiensi) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Blora terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah.
2. Melakukan analisis terhadap perkembangan dan prospek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Blora setelah pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 pada tahun-tahun mendatang guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan diperoleh kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam rangka melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah.
2. Memperluas khasanah pengkajian kemampuan keuangan Propinsi Jawa Tengah melalui upaya pajak (*tax effort*), hasil guna (*efektivitas*), dan daya guna (*efisiensi*) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Unit Peayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora.
3. Sebagai bahan informasi bagi instansi terkait dan pihak lainnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Salah satu tantangan bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan efisiensi daerah. Di mana daerah otonom harus mampu mengalihkan sumber keuangan untuk pembelanjaan kepentingan publik yang semula disesuaikan dengan "*kepentingan pusat*" sekarang lebih mengutamakan "*kepentingan daerah*". Dalam hal ini kepentingan daerah haruslah mewakili keinginan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah setempat.

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi terletak pada kemampuan daerah dalam pengelolaan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kata lain daerah mampu melaksanakan "*otonomi keuangan*" melalui upaya peningkatan kehidupan masyarakat daerah yang didokumentasikan sebagai "*community imrovement*".

Dimana setiap kegiatan yang dilakukan harus diukur kontribusinya terhadap aspek-aspek dalam masyarakat, selain sebagai identitas bagi masyarakat

yang dapat secara nyata mampu mengubah iklim sosial ekonomi di daerahnya dengan menggunakan sumber daya dan sumber dana yang ada.

Namun demikian dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan tersebut masih terlihat fokus nyata dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat daerah yang ditengarai dengan adanya beberapa faktor penyebab yang diidentifikasi sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik yang terus menerus meningkat selaras dengan penambahan penduduk, pendapatan masyarakat, dan perubahan teknologi. Sedangkan faktor lainnya, faktor eksternal yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dengan investasi yang tidak lagi mengenal batas-batas negara yang akan masuk secara sukarela ke daerah.

Dengan memperhatikan salah satu faktor yaitu rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam menyediakan fasilitas pelayanan publik sebagai upaya peningkatan otonomi keuangan daerah. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan seperti mekanisme dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah, ketentuan hukum (*peraturan daerah*), administrasi dan sistem pemungutan, dan kualitas aparatur pengelola pendapatan daerah, termasuk di dalamnya kendala-kendala yang sering dihadapi seperti sistem administrasi pendapatan daerah yang belum berjalan baik, lemahnya sistem pengawasan, dan belum tegasnya sanksi serta kemampuan manajerial pengelola keuangan daerah yang masih

rendah. Selain itu berkaitan pula dengan struktur dan perkembangan perekonomian daerah, besarnya dana perimbangan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak yang diberikan pemerintah pusat yang sering lepas dari perhatian pemerintah daerah. Dimana besar kecilnya dana perimbangan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak terutama yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterima pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, di samping perolehan penerimaan daerah yang berasal dari PAD.

Besar kecilnya PAD sangat ditentukan pula oleh tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah yang secara eksplisit tercermin dalam PDRB (*Pendapatan Domestik Regional Bruto*). Semakin tinggi pendapatan seseorang, akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai belanja atau pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah.

Dengan demikian, apapun alasannya masing-masing daerah harus tetap menjalankan kegiatannya, baik tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Di samping daerah juga harus makin menunjukkan kemandiriannya di bidang keuangan dan tidak lagi terlalu mengandalkan

sumbangan dan bantuan pemerintah pusat (dana perimbangan), serta bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat.

Namun dalam pelaksanaannya, kewenangan otonomi bagi kebanyakan daerah masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dalam APBD, di mana sekitar dua pertiga dari total pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat (Shah et. Al, 1997:95)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam analisisnya Mahi (2000:58) menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan PAD masih belum dapat diandalkan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi yang berarti pula memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi guncangan ekonomi seperti krisis ekonomi yang dihadapi suatu daerah, sehingga beberapa pajak dan retribusi yang ditetapkan untuk daerah memiliki basis pungutan yang kecil, dan sifatnya yang bervariasi pula antara daerah satu dengan daerah yang lainnya.
2. Peran PAD yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Hal ini disebabkan oleh begitu banyaknya bantuan dan subsidi yang sustru akan mengurangi "*usaha*" daerah dalam melakukan pemungutan terhadap pendapatan asli daerahnya, dan lebih mengandalkan kemampuan "*negosiasi*" daerah terhadap pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan bantuan yang lebih besar.
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. Hal ini akan mengakibatkan pemungutan pajak dan retribusi cenderung dibebani oleh biaya pungut yang lebih besar. Selain itu adanya sistem "*target*" dalam pungutan daerah, sehingga beberapa daerah lebih cenderung memenuhi target tersebut meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya

pemasukan dari pajak dan retribusi dapat melampaui target yang ditetapkan.

4. Lemahnya kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan. Hal ini akan mengakibatkan penerimaan daerah mengalami kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Selanjutnya Saragih (1996:36) menyebutkan bahwa untuk menanggulangi keterbatasan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah diperlukan adanya strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan bagi peningkatan PAD, yaitu dengan menggunakan tiga satrategi diantaranya :

“*Pertama*, strategi yang berkaitan dengan manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, *Kedua*, strategi ekstensifikasi sumber penerimaan daerah dan *Ketiga*, strategi dalam rangka peningkatan efisiensi institusi daerah”.

Dari pandangan di atas dapat dikatakan bahwa dengan pemberian otonomi sebagai pemberian wewenang, uang dapat dicari sepanjang pejabat di daerah memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dalam menciptakan “*competitive and comparative advantages*” bagi daerah dengan menggunakan strategi-strategi “*money follows functions*” dalam upaya menggali potensi keuangan daerah yang dimiliki.

Berdasarkan studi empiris Insukindro, dkk. (1994:8) disimpulkan pula bahwa peranan PAD terhadap total penerimaan APBD daerah-daerah di luar Jawa (kecuali Kotamadya Padang dan Kabupaten Sumenep) pada umumnya rata-rata masih dibawah 10%. Berdasarkan hasil-hasil studi empiris tersebut menandakan bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan APBD

Kabupaten/Kota di Indonesia relatif rendah. Kecilnya proporsi PAD dalam APBD untuk seluruh Daerah Tingkat II di Indonesia terlihat tahun 1994/1995 sebesar 12,9%, kemudian tahun 1995/1996 meningkat menjadi 13,7%.

Selanjutnya Shah (1997:88) mengemukakan bahwa derajat kemampuan keuangan di Indonesia masih dikatakan rendah, yaitu hanya 0,19%. Hal ini ditunjukkan bahwa selama kurun waktu 1984/1985 – 1990/1991 untuk Daerah Tingkat I, PAD rata-rata hanya mampu membiayai 30% dari pengeluaran rutinnya, dan untuk Daerah Tingkat II kurang dari 22% pengeluaran rutinnya yang mampu dibiayai oleh PAD (Kuncoro, 1995:17)

Sehubungan dengan hal itu, Andrews dan Amal (2001:125) dalam studi penelitiannya mengemukakan bahwa hampir dapat dipastikan bahwa pemerintahan yang paling “*mandiri*” dari sudut pandang keuangan adalah desa.

Dari data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga dari seluruh pengeluaran pembangunan yang dikerjakan oleh desa (atau yang setingkat dengan itu) di akhir tahun 1970-an dibiayai oleh desa sendiri. Kemandirian keuangan ini dalam kenyataannya harus dibayar mahal warga desa yang dipaksa untuk menyumbangkan tenaga dan materi kepada berbagai proyek-proyek pembangunan di tingkat lokal yang mana subsidi hanyalah merupakan sebagian kecil input yang tidak dapat disediakan secara lokal.

Dari beberapa penelitian dan analisis yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya seperti yang telah diuraikan di muka dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian, analisis, dan penelitian tampaknya hanya

mengungkapkan dan memperhatikan upaya peningkatan PAD yang berasal dari sektor penerimaan yang sudah jelas pemungutannya, sedangkan dari sisi tax effort, efektivitas dan efisiensi pajak itu sendiri belum tersentuh.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan mendasarkan pada asas desentralisasi bagi Kabupaten atau Kota, maka secara finansial pemerintah daerah harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat utamanya adalah sifat independen dalam merencanakan dan menggunakan keuangan. Selain itu daerah diharapkan mempunyai pendapatan yang elastis, dalam arti mempunyai keleluasaan dalam penggunaannya bagi kepentingan masyarakat di daerah.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya optimalisasi penerimaan PAD untuk meningkatkan kontribusi yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penerimaan APBD. Sejalan dengan hal tersebut, maka derajat desentralisasi fiskal akan meningkat dan derajat ketergantungan fiskal akan semakin menurun. Atau dengan kata lain, kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah tanpa transfer dari pemerintah pusat harus semakin meningkat, dengan tingkat pertumbuhan PAD lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan total penerimaan daerah, sehingga derajat desentralisasi fiskal akan meningkat. Hal ini dapat ditunjukkan melalui struktur pengeluaran daerah, dimana derajat desentralisasi keuangan daerah dapat tercermin melalui angka indeks kemampuan rutin, yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa tranfer pemerintah pusat (Kuncoro, 1995:9)

Untuk menanggulangi keterbatasan dana pembangunan dari pemerintah pusat bagi penyelenggaraan pembangunan daerah diperlukan adanya strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan bagi peningkatan PAD di tiap daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Maxwel ( dalam Ravianto 1997:43 ) mengemukakan bahwa kemampuan dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang independen. Hal terpenting bagi otonomi daerah adalah bahwa daerah mempunyai keleluasaan terutama dalam menggunakan dana bagi kepentingan masyarakat daerah (Davey, 1988:40)

Dengan demikian alokasi dana yang berasal dari pemerintah pusat yang disertai kontrol yang ketat dalam penggunaannya tidak akan mendorong daerah dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, tetapi justru dapat mematikan insiatif daerah yang bersangkutan serta membuat daerah menjadi semakin bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat (Ravianto, 1997:42)

## **B. Rencana Tindakan Peningkatan Pendapatan Daerah**

Dari bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan "*social overhead capital*" yang cukup memadai. Namun kendala utama dalam penyediaan tersebut adalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, khususnya setelah kebijakan otonomi daerah direalisir. Untuk mengatasi



kendala ini, pemerintah dapat menjalankan suatu rencana tindakan peningkatan pendapatan daerah

Rencana tindakan peningkatan pendapatan daerah yang selanjutnya disebut RETIKAT-PATDA merupakan program yang terencana, terpadu, efisien dan efektif secara berkelanjutan selaras dengan perkembangan perekonomian.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kirana (1996:22) mengatakan bahwa tujuan rencana tindakan peningkatan pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah adalah untuk :

1. Mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi daerah.
2. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang harus diformulasikan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka mengantisipasi perubahan pada unsur-unsur penerimaan seiring dengan perkembangan perekonomian.

Dari kedua tujuan tersebut di atas, dapat jelaskan pula bahwa rencana tindakan peningkatan pendapatan daerah tersebut adalah merupakan program yang harus memiliki sifat perbaikan yang berkesinambungan.

Sedangkan unsur-unsur penerimaan daerah yang dapat dijadikan sasaran rencana peningkatan penerimaan daerah menurut Kirana (1996:28) adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah, yaitu jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah meliputi jenis-jenis pajak yang belum dipungut oleh pemerintah pusat.

Lapangan pajak daerah merupakan seluruh lapangan pajak dikurangi lapangan pajak yang telah digunakan atau disediakan untuk pemerintah pusat.

2. Retribusi daerah, yaitu pungutan sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan atas jasa yang nyata dari pemerintah daerah. Jasa ini dapat berupa jasa pekerjaan, jasa atas usaha atau milik daerah, dan jasa lainnya, termasuk jasa ijin dalam rangka pengendalian yang secara langsung memberikan manfaat bagi pemakai dan memberikan manfaat secara umum bagi masyarakat.

Dari berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang akan dijadikan sasaran atau dipungut tersebut diatas haruslah dipilih beberapa yang memenuhi syarat kelayakannya, seperti syarat kecukupan, keadilan, efisiensi, kelayakan, administratif, dan kecocokan untuk diterapkan. Tujuan utama dari pemilihan sasaran ini adalah agar tidak melakukan penarikan pajak atau retribusi daerah yang tidak mencukupi, tidak adil, tidak layak secara administratif, memperburuk efisiensi ekonomi atau yang tidak layak untuk diterapkan.

Selanjutnya untuk menilai potensi pajak daerah atau retribusi daerah yang telah dinilai di atas dapat digunakan matrik klasifikasi potensi pajak atau retribusi daerah sebagai berikut :

**Tabel 1****Matrik Potensi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah**

| <div style="text-align: center;"> <div style="display: inline-block; transform: rotate(-45deg); transform-origin: center;"> PROPORSI<br/>TAMBAHAN </div> </div> | $\frac{X_i}{X_o}$   | $\frac{X_i}{X_o}$   |
|---|---------------------|---------------------|
|   | $\frac{AX_i}{AX_o}$ | $\frac{AX_i}{AX_o}$ |
|   | PRIMA               | BERKEMBANG          |
|   | POTENSIAL           | KETERBELAKANG       |

Sumber : Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis,  
Program Penataran Manajemen Sektor Ekonomi  
Strategis, UGM, 1996, Yogyakarta.

Proporsi suatu jenis pajak daerah dari rata-rata, yaitu  $X_i/X_o$ .  $X_i$  adalah nilai pajak daerah atau retribusi daerah dan  $X_o$  adalah nilai rata-rata dari pajak daerah atau retribusi daerah. Di mana semakin besar proporsi suatu pajak daerah atau retribusi daerah dari total pajak daerah atau retribusi daerah, maka semakin layak pajak daerah atau retribusi daerah tersebut untuk dipungut. Namun sebaliknya semakin kecil proporsi suatu pajak daerah atau retribusi daerah dari total pajak daerah atau retribusi daerah tersebut semakin tidak layak pajak daerah atau retribusi daerah itu dipungut.

Proporsi tambahan suatu jenis pajak daerah dari total tambahan penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah dan  $AX_i/AX_o$ ,  $AX_i$  adalah

tambahan penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah dan  $AX_o$  adalah total tambahan penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah. Di mana semakin besar proporsi tambahan suatu pajak daerah dari total tambahan pajak daerah atau retribusi, maka semakin layak pajak daerah atau retribusi daerah tersebut untuk dipungut. Namun sebaliknya semakin kecil proporsi tambahan suatu pajak daerah atau retribusi daerah dari total tambahan suatu pajak daerah atau retribusi daerah tersebut semakin tidak layak pajak daerah atau retribusi itu dipungut.

Interpretasi tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada kolom prima, suatu jenis pajak daerah atau retribusi daerah memiliki  $X_i/X_o \geq 1$  dan  $AX_i/AX_o \geq 1$ , hal ini berarti bahwa pajak atau retribusi daerah tersebut memiliki kontribusi daerah. Dengan demikian pajak atau retribusi daerah tersebut sangat baik untuk terus dipungut.

Berhasil tidaknya suatu pengumpulan pendapatan daerah dalam usaha pencapaian target pendapatan bahwasannya tergantung pada usaha terkoordinir yang dilaksanakan dengan baik. Selain itu dalam merumuskan rencana tindakan peningkatan pendapatan daerah harus dipertimbangkan pula aspek-aspek pelaksanaan praktis, dan persyaratan yang memungkinkan pelaksanaannya. Untuk merumuskan rencana tindakan pendapatan daerah dengan baik harus dikaji hubungan sebab akibat antara tindakan yang diusulkan dengan hasil-hasil yang diharapkan. Apabila terhadap hubungan yang tidak jelas, maka harus diusulkan rencana tindakan “uji coba” yang dimaksudkan untuk menambah

pengetahuan dan pengalaman untuk diterapkan pada perumusan rencana tindakan peningkatan pendapatan daerah berikutnya.

Dalam upaya pencapaian target, langkah pertama yang dilakukan adalah mengkaji karakteristik pungutan dalam status, sifat dan fungsinya. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap standar pelaksanaan. Di dalam uraian ini harus disimpulkan penilaian kegiatan manajemen dan pungutan pajak atau retribusi daerah dengan memberikan ulasan tentang keefektifan, yaitu keberhasilan mencapai sasaran dan tingkat efisiensi, yaitu keberhasilan menekan biaya pemungutan dan manajemen pendapatan.

Sebagai keperluan pemantauan pelaksanaan rencana peningkatan pendapatan daerah untuk pengendalian operasional diperlukan alat-alat manajemen berupa rasio standar yang diperlukan untuk melakukan pemantauan terhadap pengelolaan pendapatan yang dikaitkan dengan prakiraan laju inflasi seperti terlihat pada tabel berikut ini (Kirana, 1996:32)

**Tabel 2****Standar Penerimaan pendapatan**

| No | Uraian   | Perkiraan Rerata Inflasi Tahunan |                      |
|----|--|----------------------------------|----------------------|
|    |  | Kurang dari 2 %                  | 2,5% atau lebih      |
| 1. | Jumlah Pendapatan<br>% Kenaikan  | % inflasi                        | % inflasi            |
| 2. | Keefektifan :<br>- Studi cakupan<br>- Rasio cakupan                        | Tiap 2 tahun<br>95 %             | Tiap 2 tahun<br>95 % |
| 3. | Biaya pemungutan :<br>- Studi Biaya Pemungutan<br>- Rasio Biaya Pemungutan | Tiap tahun<br>10 %               | Tiap tahun<br>10 %   |
| 4. | Biaya pelayanan :<br>- Studi Pengelolaan<br>- Rasio Biaya Pelayanan        | Tiap tahun<br>90 %               | Tiap tahun<br>90 %   |
| 5. | Efisiensi<br>- Rasio Pemungutan  | 95 %                             | 95 %                 |
| 6. | Revisi Peraturan Daerah  | Tiap 2 tahun                     | Tiap 2 tahun         |

Sumber : Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis.  
Program Penataran Manajemen Sektor Ekonomi Strategis,  
UGM, 1996, Yogyakarta.

Dari rasio standar di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mempertahankan daya beli, prosentase kenaikan rata-rata pendapatan harus lebih tinggi atau minimal sama dengan tingkat laju inflasi yang diperkirakan pada tahun bersangkutan. Berkenaan dengan pajak daerah biaya pemungutan harus ditekan agar pendapatan bersih meningkat, sedangkan penerimaan retribusi idealnya harus dapat menutup biaya pelayanannya atau bahkan mendatangkan keuntungan.

Dalam biaya pemungutan didalamnya adalah termasuk biaya “langsung” (gaji, alat tulis, dll) dan biaya penyusutan, sedangkan ukuran efektifitas

pemungutan diperoleh dari perbandingan antara realisasi pemungutan dengan jumlah tagihan termasuk tunggakan.

### **C. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Dalam pelaksanaan desentralisasi keuangan, keberadaan prinsip "*money follows function*" harus dilaksanakan secara konsisten, hal ini untuk menghindari terjadinya tranfer sumber keuangan yang sudah dikuasai oleh daerah tetapi tidak diikuti oleh tugas desentralisasi yang menjadi tanggung jawab daerah (Roy Bahl, 2001). Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya upaya untuk meningkatkan taxing power daerah antara lain melalui penyerahan beberapa pajak pusat kepada daerah, dimana Kabupaten/Kota perlu diberikan tambahan pendapatan dengan memberikan kewenangan penuh memungut pajak daerah sampai dengan besaran tertentu. Kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat menghilangkan upaya daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak distortif terhadap perekonomian.

Selanjutnya Sidik (2002:3) mengatakan bahwa penggalan sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari pajak daerah ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Model Leviathan mengatakan bahwa pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi secara teoritis tidak terlalu menghasilkan total penerimaan yang maksimal. Kondisi ini tergantung oleh

respon wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Teori ini pada dasarnya dapat dijadikan pertimbangan utama bagi pemerintah daerah dalam upaya menggali sumber-sumber keuangan yang berasal dari pajak daerah yang tidak selalu berorientasi pada pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk mencapai total penerimaan yang maksimal, termasuk pada pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sehubungan dengan tersebut Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2002 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2002. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut keputusan Gubernur Jateng tersebut adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Bea balik nama kendaraan bermotor menurut Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut diartikan sebagai pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan



bahwa bea balik nama kendaraan bermotor akan dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap subyek pajak pada kendaraan bermotor sebagai bagian dari cakupan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan hal tersebut Nepirin (1996:19) mengatakan bahwa dalam usaha peningkatan cakupan, baik berupa ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap penerimaan pajak daerah termasuk PKB dan BBNKB perlu memperhatikan 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Menambah obyek dan subyek pajak. Peningkatan cakupan pendapatan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak.
2. Meningkatkan besarnya penetapan. Dalam penelitian potensial pendapatan perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya kesenjangan yang disebabkan data potensi tidak tersedia dengan akurat sehingga besarnya penetapan pajak belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Dalam rangka peningkatan cakupan, perlu dideteksi kemungkinan adanya kebocoran dan mengevaluasi kembali besarnya penetapan serta estimasi terhadap besarnya potensi. Sistem dan prosedur pemungutan perlu dipelajari dengan seksama apabila perlu dengan bantuan auditor yang berpengalaman.
3. Mengurangi tunggakan. Peningkatan cakupan dapat dilakukan dengan mengurangi besarnya tunggakan. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tunggakan rekening, kemudian diambil langkah-langkah kongrit untuk mengurangi tunggakan yang ada maupun mencegah terjadinya tunggakan baru. Dalam hal ini diperlukan adanya penyelenggaraa administrasi tunggakan yang lengkap dan rapi.

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa upaya peningkatan cakupan tersebut bertujuan untuk mencapai sasaran penerimaan pajak daerah (PKB dan BBNKB) yang sesuai dengan potensi yang ada secara efisien dan

efektif, di samping melakukan identifikasi tindakan-tindakan korektif yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber-sumber penerimaan pajak daerah, seperti biaya pemungutan, biaya pelayanan dan perubahan peraturan daerah tentang tarif.

Lebih spesifik Kirana (1996:28) menjelaskan bahwa umpan balik yang diberikan oleh fungsi perencanaan dan pengendalian operasional dalam upaya peningkatan pendapatan pajak daerah mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan pengumpulan data. Pada tahap ini kegiatan diutamakan pada pengumpulan data keuangan atau menginventarisir data yang ada selama 5 tahun terakhir yang akan digunakan dalam proses perencanaan berikutnya. Adapun tujuan pengumpulan data ini adalah ;
  - a) sebagai dasar untuk perhitungan potensi penerimaan daerah yang realistis atau mendekati keadaan yang sebenarnya.
  - b) Sebagai dasar penyusunan program atau rencana tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang diarahkan kepada subyek pajak maupun pengelola keuangan daerah, dan
  - c) Sebagai dasar penyusunan target penerimaan pendapatan pajak daerah yang mencerminkan potensi pajak yang ada dan kemampuan pengelolaan pendapatan pajak daerah.
2. Identifikasi dan penelitian pokok. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah :
  - a) memilih jenis unsur penerimaan daerah yang memerlukan penelitian lapangan lebih lanjut untuk mendapatkan data yang paling nyata
  - b) mendesain instrumen penelitian (kuesioner) baik yang diperlukan sebagai pedoman wawancara maupun observasi
  - c) menyusun tagihan waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data sesuai dengan jumlah tenaga
  - d) merangking syarat-syarat kelayakan unsur-unsur penerimaan pajak daerah dan
  - e) menentukan metode yang digunakan sehingga semua potensi yang ada dapat diidentifikasi.

3. Pengolahan data. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah meliputi :
  - a) editing yaitu melakukan pemeriksaan jawaban dalam daftar isian kuesioner sehingga jawaban yang salah atau meragukan dan kurang lengkap dapat diperbaiki
  - b) inputing yaitu memasukkan data ke komputer sesuai dengan program software yang ada (lotus, symphony atau excel) yang memungkinkan untuk diolah lebih lanjut. Hasil dari inputing ini adalah worksheet atau tabel master yang berisi beberapa variabel beserta alternatif jawabannya.

Selanjutnya sebagai landasan operasional pengenaan pajak seperti yang dimaksud Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2002 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah diterbitkan pula Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 973/5522/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 973/5523/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemberlakuan kedua Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tersebut adalah merupakan dasar hukum yang memberikan petunjuk teknik pelaksanaan bagi para petugas di jajaran Dinas Pendapatan Daerah termasuk Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) yang berada di tingkat Kabupaten/Kota. Petunjuk teknis pelaksanaan ini disusun secara sistematis untuk dijadikan pedoman dalam pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Unit Pelayanan Pendapatan

Daerah (UPPD) Kabupaten/Kota, termasuk UPPD Kabupaten Blora utamanya yang menyangkut permasalahan teknis administrasi pemungutan dan administrasi penerimaan yang kesemuanya telah mengacu pada mekanisme baku maupun dasar hukum yang berlaku. Dengan dilandasi petunjuk penafsiran yang akan membias dari ketentuan perundangan yang berlaku, di samping akan diperoleh kesatuan pandang dan pemahaman yang memadai dalam memperlancar, dan ketertiban pelaksanaan pemungutan untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemungutan berbagai pajak daerah, termasuk PKB dan BBNKB haruslah dinilai agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Indikator yang biasa digunakan untuk menilai pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Hasil (*yield*) yaitu memadai tidaknya hasil pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayai, stabilitas dan mudah tidak memperkirakan besar hasil pajak perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya.
2. Keadilan (*equity*), yaitu dasar pajak dan kewajiban membayar jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang

sama, adil secara vertikal artinya beban pajak lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumberdaya yang lebih besar dan pajak itu harus adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali jika memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

3. Efisiensi ekonomi, yaitu pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil "*beban lebih*" pajak.
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), yaitu suatu pajak daerah harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue source*), yaitu pajak haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing daerah, dan pajak hendaknya tidak

menimbulkan beban yang lebih besar dari kemauan tata usaha pajak daerah.

Dari uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara substantif pajak kendaraan bermotor sebagai pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha adalah merupakan indikator-indikator yang dijadikan sasaran dalam rencana tindakan peningkatan pendapatan daerah, terutama dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lengkap mengenai hal tersebut di atas, lebih lanjut penelitian ini akan berusaha menganalisis faktor-faktor sebagai indikator yang melingkupi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diantaranya meliputi upaya pajak (*tax effort*), hasil guna (efektivitas), dan daya guna (*efisiensi*) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Blora.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai indikator-indikator yang merupakan faktor-faktor dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berikut akan dibahas teori-teori yang mendasarinya.

### **C.1. *Upaya Pajak (tax effort)***

Dalam hubungannya dengan pembangunan daerah, faktor keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting. Tanpa adanya ketersediaan finansial yang mencukupi, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan bagi kepentingan masyarakat di daerah menjadi tidak optimal. Selain itu daerah diharapkan mempunyai pendapatan yang elastis, dalam arti mempunyai keleluasaan dalam penggunaannya bagi kepentingan masyarakat diwilayahnya. Dalam kaitan ini maka penerimaan PAD harus dapat dioptimalkan kontribusinya terhadap APBD.

Hasil studi empiris Miller dan Russek dalam Arsyad (1999) menjelaskan bahwa pajak daerah dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah bagaimana mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui pajak daerah yang secara tepat mengarahkan serta menggunakan penerimaan tersebut untuk pengeluaran yang sifatnya strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Perkembangan ekonomi daerah dimungkinkan akan berdampak positif terhadap PAD, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mangkoesoebroto (1998:73) yang menyatakan bahwa :

“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat dan semakin meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang-barang publik”.

Berkaitan dengan perkembangan ekonomi suatu daerah, Kirana (1996:20) mengemukakan bahwa :

“Perkembangan PDRB per kapita riil dapat dilihat dari semakin tingginya pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability pay*) berbagai pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah (Tingkat I dan II), semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah (Tingkat I atau II), semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah (Tingkat I dan II), semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut”.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pada saat PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak akan semakin tinggi pula. Namun sebaliknya, pendapat lain mengatakan bahwa PDRB bukanlah merupakan indikator kemampuan bayar pajak yang obyektif terhadap keberadaan pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Beberapa keberatan-keberatan atas penggunaan PDRB sebagai indikator kemampuan bayar pajak diantaranya adalah *Pertama*, bahwa PDRB “*tidak secara langsung*” mencerminkan pendapatan bersih daerah (sebagian



besar pendapatan di daerah bersangkutan diterima oleh pengusaha yang tidak tinggal di daerah yang bersangkutan), Kedua, bahwa tidak semua kegiatan ekonomi di suatu daerah mudah dibebani pajak, dan ketiga, bahwa data PDRB itu sendiri meragukan. Dengan kata lain faktor kelemahan utama terletak pada data PDRB menunjukkan tingkat pendapatan yang dihasilkan suatu daerah belum menggambarkan pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersangkutan.

Propinsi-propinsi yang kaya akan sumber daya dapat menghasilkan lebih tinggi PRDB, namun sering terjadi nilai tambah yang diciptakan tidak menetap dan terserap di Propinsi tersebut karena kekuatan efek ganda inter-regional (*inter regional multiplier effects*) lebih sangat dominan dibandingkan dengan efek ganda intra-regionalnya (*intra-regional multiplier effects*). Hal ini berarti pula bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan upaya pajak agar penerimaan pajak juga meningkat.

Untuk mengetahui besarnya upaya pajak pada PKB dan BBNKB dapat dilakukan dengan cara mengukur hubungan antara penerimaan pajak dengan perkembangan ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB Kabupaten Blora yang diformulasikan dengan rumus sebagai berikut :

**(Penerimaan Pajak)  $t$**

$$\text{Upaya pajak (tax effort)} = \frac{\text{Penerimaan Pajak } t}{\text{PDRB } t} \times 100\%$$

## C.2. Hasil Guna (*effectivity*)

Berbagai penelitian maupun teori telah banyak membahas mengenai efektivitas, baik pada sektor privat maupun sektor publik (birokrasi) sesuai dengan perspektif dan kegunaan yang ingin diperolehnya. Bagi seorang ekonom, efektivitas adalah keuntungan yang diperolehnya. Bagi seorang ekonom, efektivitas adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan.

Sedangkan efektivitas bagi seorang manajer produksi adalah berhubungan dengan kuantitas dan kualitas dari produk yang dihasilkan. Jadi konsep efektifitas ini memiliki pengertian yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya, hal ini tergantung pada kerangka acuan yang digunakannya.

Konsep mengenai efektivitas juga harus dibedakan dengan istilah efisiensi. Efisiensi mengandung pengertian bagaimana melakukan sesuatu dengan baik "*doing thing right*" atau kemampuan untuk meminimisasikan penggunaan sumber daya yang ada, sedangkan efektifitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan tertentu yang ingin dicapai "*doing the right things*" (Stoner-et al, 1995:9)

Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat luas. Oleh beberapa para ahli dan pakar ilmu pengetahuan, belum ada keseragaman pandangan mengenai konsep efektivitas tersebut. Hal ini disebabkan adanya sudut pandang yang berbeda dalam melihat konsep efektivitas menurut disiplin ilmu masing-masing, sehingga melahirkan konsep yang beragam pula. Dengan demikian,

maka hal tersebut akan berpengaruh pula terhadap perbedaan dalam mengukur efektivitas itu sendiri. Untuk mengetahui pengertian efektivitas secara jelas berikut akan dikemukakan beberapa pendapat dari para pakar dan ahli tentang konsep tersebut.

Etzioni dalam Lubis dan Huseini (1987:54-55) mengemukakan bahwa efektivitas dapat dinyatakan sebagai suatu tingkat keberhasilan dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Berdasarkan pendapat tersebut, efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam mencapai sasaran. Selanjutnya Indrawijaya (1989:228), mengukur efektivitas dari 3 (tiga) unsur yang berbeda yaitu, produktivitas (efisiensi dalam arti ekonomi), tekanan-stres (dibuktikan dengan tingkat ketegangan dan konflik), dan fleksibilitas (kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan intern dan ekstern).

Pendapat tersebut mengukur efektivitas dititikberatkan pada produktivitas dalam arti efisiensi, tingkat ketegangan dan konflik, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan keseimbangan alam sub sistem dan antar personil. Lebih lanjut Rivanto (1985:113) mengatakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauhmana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam hal waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa efektivitas sebagai kebutuhan untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mencapai tujuan mencakup kriteria seperti diantaranya, kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan kerja, hasil yang dicapai dan pencapaian sumber daya yang menunjang terwujudnya suatu tujuan. Dengan kata lain efektivitas adalah merupakan pemanfaatan sumber daya dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah unit tertentu dengan mutu tertentu tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Campbell dalam Richard M. Steers (1997:45) mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) ukuran yang paling menonjol untuk mengukur efektivitas melalui pendekatan ukuran univariasi yang meliputi : *Pertama*, keseluruhan prestasi, *Kedua*, produktivitas, *Ketiga*, kepuasan kerja pegawai, *Keempat*, tingkat penghasilan dan *Kelima*, masuk keluarnya karyawan atau anggota organisasi.

Dengan memperhatikan ukuran efektivitas melalui pendekatan univariasi dapat dijelaskan bahwa tingkat penghasilan sebagai salah satu ukuran efektivitas apabila dikaitkan dengan indikator yang digunakan untuk mengukur hasil guna atau efektivitas pajak daerah adalah merupakan rasio antara hasil pajak daerah (PKB dan BBNKB) yang dipungut dibandingkan dengan potensi hasil pajak daerah (PKB dan BBNKB). Dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan, dan

membayar semua pajak terhutang. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa semakin besar penerimaan pajak daerah yang dipungut, maka pajak daerah tersebut dikatakan efektif, namun sebaliknya apabila penerimaan pajak daerah yang dipungut tersebut rendah, maka pajak daerah itu dikatakan tidak efektif.

Bahwasanya terdapat tiga faktor yang mengancam hasil guna pemungutan pajak, diantaranya adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Untuk menghindarkan diri dari ketiga faktor yang mengancam efisiensi tersebut, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penentuan wajib pajak, yaitu perlu adanya prosedur pajak yang menyulitkan wajib pajak untuk menyembunyikan hutang pajaknya.
- b. Menetapkan nilai pajak terhutang, yaitu nilai pajak terhutang harus ditentukan dengan cermat dengan melibatkan wajib pajak dan petugas pajak dalam menentukan nilai obyek pajak yang sesungguhnya dan menentukan tarif pajak yang benar.
- c. Memungut pajak, yaitu cara pemungutan pajak harus mudah untuk dilaksanakan, seperti kewajiban menunjukkan surat tanda bukti lunas pajak apabila wajib

pajak hendak mendapatkan kontrak, surat izin atau layanan masyarakat lainnya.

- d. Pemeriksaan kelalaian pajak, yaitu untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem catatan yang baik yaitu yang dapat segera mengetahui kelalaian pajak.

Untuk mengetahui besarnya efektivitas PKB dan BBNKB dapat dilakukan dengan cara mengukur hubungan antara hasil pungut pajak dengan potensi pajak yang diformulasikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Hasil guna (efektifitas) pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Pajak}} \times 100\%$$

### C.3. Daya guna (*efisiensi*)

Beberapa ahli manajemen telah menyatakan bahwa ukuran suatu kinerja mencakup keefektifan dan efisiensi. Efisiensi itu sendiri tidak terlepas dari konteks produktivitas, yaitu suatu kemampuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan keluaran yang optimal, bahkan kalau mungkin yang maksimal. Hal yang perlu ditekankan adalah kemampuan untuk memperoleh manfaat dari masukan dengan menghasilkan output yang maksimal (Siagian, 1983:154).

Selanjutnya Sinungan (2000:18) mengemukakan produktivitas adalah merupakan perbandingan antara totalitas masukan selama periode tertentu.

Dengan kata lain diartikan sebagai perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil, dan perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satuan unit.

Lebih lanjut Lawrances dalam Mulyono (1990:87) menyoroti pentingnya *partial productivity* yang ditekankan pada :

1. Tingkat efisiensi dari hasil pekerjaan yang senyatanya yang biasanya direfleksikan oleh rasio keluaran dibanding dengan masukan.
2. Tingkat efisiensi fisik yaitu ukuran dari suatu pekerjaan fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bambang (1993:2-3) menawarkan 4 (empat) solusi untuk mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan sedikit sumber daya untuk mengurangi jumlah produksi yang sama.
2. Pengurangan sumber daya sekedarnya untuk memperoleh jumlah produksi yang lebih besar.
3. Penggunaan jumlah sumber daya yang sama untuk memperoleh jumlah produksi yang lebih besar.
4. Penggunaan jumlah sumber daya yang lebih besar untuk memperoleh produksi yang jauh lebih besar lagi.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas, yang dimaksudkan dengan produktivitas secara umum adalah kemampuan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa secara berdaya guna atau efisien, sehingga tercapai target yang diharapkan, baik volume atau jumlah maupun waktu yang telah ditetapkan dengan menggunakan semua faktor produksi.

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan daya guna atau efisiensi pajak daerah, maka tujuan dari tingkat efisiensi ini dimaksudkan sebagai indikasi dimana biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah tidak lebih besar dari perolehan atau penerimaan pajak daerah yang dipungut. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa semakin kecil biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah, maka pajak daerah tersebut dikatakan efisien, namun sebaliknya semakin besar biaya yang digunakan untuk memungut pajak daerah tersebut, maka pajak daerah tersebut tidak efisien. Biaya yang dikeluarkan tersebut, selain mencakup biaya langsung pada UPPD yang bersangkutan, dan juga memperhitungkan biaya-biaya tidak langsung seperti waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan, membantu kegiatan memungut pajak, dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui besarnya efisiensi PKB dan BBNKB dapat dilakukan dengan cara mengukur hubungan antara biaya pemungutan pajak dengan penerimaan pajak yang diformulasikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Daya guna (efisiensi) pajak} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$



## **B A B    III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian / Perspektif Pendekatan Penelitian**

Perspektif pendekatan yang digunakan dalam metode kualitatif pada penelitian ini adalah “naturalistik”. Dalam perspektif ini menurut Faisal ( 1991 : 53 ), maka karakteristik yang ditekankan adalah :

1. Sumber data ialah situasi yang wajar (*natural setting*)
2. Peneliti sebagai instrumen penelitian, memahami makna dengan membaca mimik subjek penelitian
3. Informasi yang diperoleh sangat deskriptif
4. Peneliti bertujuan mencari “makna”
5. Data primer diutamakan (dari sumber langsung)
6. Triangulasi (memadukan teori, data dan analisis di dalam pembahasannya)
7. Konteks penelitian dideskripsikan secara rinci
8. Subjek dan peneliti berkedudukan sama
9. Perspektif “emic”

Rancangan penelitian ini merupakan rancangan awal yang akan mencoba menggali informasi secara mendalam berkaitan dengan Upaya Peningkatan PAD Propinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan oleh UPPD Kabupaten Blora.

Secara deskriptif penelitian ini akan melihat kontribusi yang diberikan dalam peningkatan PAD Popinsi Jawa Tengah oleh *Tax Effort*, *Efektivitas* dan *Efisiensi* Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) Kabupaten Blora.

Dalam kegiatan penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah penelitian deskriptif – eksploratif . Menurut Singarimbun ( 1995:5 ) Penelitian deskriptif eksploratif adalah penelitian yang berupaya menjelaskan fenomena yang diamati dalam kegiatan penelitian secara jelas melalui penggalan infomasi yang mendalam dan menjelaskannya secara deskriptif. Dalam kegiatan penelitian ini , peneliti mencoba mengadakan analisis secara detail melalui kegiatan pengamatan di lapangan serta mencatat beberapa data yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa sumber yang mempunyai kompetensi berkaitan dengan kegiatan penelitian.

## **B. Fenomena Yang Diamati**

Dalam penelitian ini titik berat yang disoroti sebagai analisis dari hasil kajiān pustaka dan studi lapangan, berkaitan dengan fenomena yang ada atau berkembang di lapangan. Fenomena yang diamati mencakup berbagai hal yang kemudian peneliti uraikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep dan penjelasan konsep – konsep tersebut.

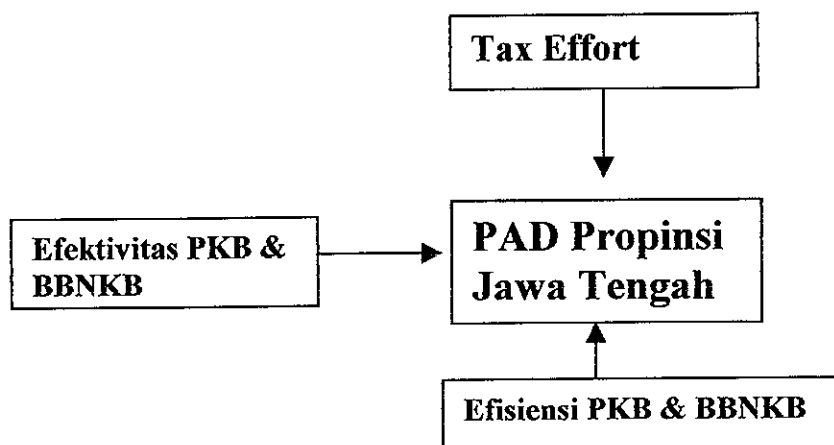
### B.1. Kerangka Konsep

Di dalam mengawali penelitiannya, memang peneliti telah mengenal konsep-konsep yang pernah ada atau diajukan orang lain berkaitan dengan situasi atau permasalahan tertentu yang sedang menjadi perhatian si peneliti. Akan tetapi sekali lagi semua konsep tersebut harus disikapi sebagai “tidak meyakinkan”. Penelitian kualitatif tidak diawali dengan mengajukan konsep, kategori atau hipotesa (Baker, 1986:23-24).

Penelitian ini masih menggunakan kerangka konsep dan definisi konsep namun konsep dan definisi tersebut diletakkan dalam kerangka “dugaan”. Konsep dan definisi tersebut tidak digunakan untuk membatasi eksplorasi ke dalam situasi yang diteliti, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah memahami makna situasi yang diteliti apa adanya. Konsep-konsep yang diduga berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini peneliti sajikan dalam gambar sebagai berikut :

**Gambar 1**

Kontribusi Tax Effort, Efektivitas dan Efisiensi Dalam Peningkatan PAD



Dalam penelitian ini, akan dilakukan studi deskriptif - eksploratif guna melihat beberapa fenomena pengamatan yang memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Propinsi JawaTengah. Secara khusus akan dilihat sejauh mana kontribusi yang diberikan oleh UPPD Kabupaten Blora terutama dalam upaya peningkatan PAD dari sektor Pajak. Lebih jauh dan rinci, penelitian ini akan difokuskan kontribusi dari Tax Effort, Efektivitas dan Efisiensi dari Perolehan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) Kabupaten Blora melalui Dinas Teknis Dipenda Propinsi Jawa Tengah yaitu Unit Pelayanan Pendapatan Daerah ( UPPD ) Kabupaten Blora.

## **B. 2. Definisi Konsep**

Dalam penelitian ini beberapa hal yang berkaitan dengan konsep penelitian akan diuraikan pengertian dasar atau konsep yang diantaranya meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah penerimaan Propinsi Jawa Tengah yang berasal dari daerah yang terealisasi pada tahun anggaran tertentu, terdiri atas :
  - Pajak Daerah ( Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor )
  - Retribusi Daerah
  - Laba Perusahaan Milik Daerah
  - Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- b. Upaya Pajak ( *Tax Effort* ) adalah prosentase kemampuan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) yang dipengaruhi oleh tingkat perkembangan PDRB riil.
- c. Hasil Guna ( efektifitas ) adalah prosentase kemampuan memungut potensi Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) yang diharapkan.
- d. Daya Guna ( efisiensi ) adalah prosentasi kemampuan dalam menggunakan biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) secara minimal untuk memperoleh hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) yang maksimal.

### **C. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan desain penelitian yang dirancang, maka lokasi penelitian adalah tempat dimana permasalahan tersebut terjadi. Jadi, lokasi penelitian ini adalah Unit pelayanan Pendapatan Daerah ( UPPD ) Kabupaten Blora dan institusi lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian .

### **D. Pemilihan Subjek Atau Informan**

Dalam penelitian kualitatif, penelitian sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, dan memulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis

sehingga masing-masing konteks ditangani dari segi konteksnya sendiri (Lincoln dan Guba dalam Poerwandari, 1998:123-124 ). Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti harus dapat menentukan sampel dalam populasi yang akan diteliti. Sampling lebih bertujuan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, sehingga informasi tersebut akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Karena itu dalam penelitian ini sample (selanjutnya akan disebut dengan subjek) akan diambil secara tak acak (non-random) dan disebut dengan "*purposive-sample*" (Moleong, 2000:239).

Populasi yang akan diteliti adalah anggota organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah ( UPPD ) Kabupaten Blora, sedang mengenai sampel, karena tipe penelitian ini adalah kualitatif, maka sampel yang dipilih akan bergerak seluas mungkin. Adapun teknik yang diambil dalam penentuan sampel adalah dilakukan secara *purposive*. Responden yang dipilih adalah orang yang sengaja dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai sumber data atau informasi dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian (R. Soetrisno, op cit hal. 73). Pengambilan sampel akan dilakukan sejauh informasi yang didapat belum menunjukkan tuntasnya perolehan informasi / *Snowballing* (Faisal, 1991 : 57).

## **E. Jenis Sumber Data**

### **E. 1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pejabat dan pegawai pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah ( UPPD ) Kabupaten Blora, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan beberapa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) di Kabupaten Blora yang berhubungan erat dengan masalah penelitian.

### **E.2. Data Sekunder**

Untuk melengkapi data lapangan maka penulis perlu melakukan kajian pustaka, data-data penunjang lainnya tentang profil Jawa Tengah dan Kabupaten Blora, beberapa informasi penunjang dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah ( UPPD ) Kabupaten Blora dan instansi terkait yang terkait dalam kegiatan penelitian ini.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam kaitan dengan pengumpulan data, perlu dipahami bahwa hal tersebut tidak lepas dari cara pencatatan atau dokumentasi data. Penelitian kualitatif data dikumpulkan melalui wawancara antara peneliti dengan informan (subjek). Selain itu juga memanfaatkan berbagai catatan, gambar-gambar,

rekaman (audio/visual) atau benda-benda yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Khusus mengenai wawancara, dalam hal ini digunakan daftar pertanyaan yang lebih bersifat sebagai "*interview guide*" dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan terbuka. Di samping menggunakan wawancara, data juga dikumpulkan melalui observasi atau pengamatan. Pengamatan tersebut bertujuan untuk memahami tingkah laku atau situasi apa adanya di dalam konteks permasalahan.

Menurut Marshall dan Rossman (1989 :141-146) teknik-teknik dasar yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian-penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara mendalam. Semua data baik yang berupa data primer atau sekunder dicatat secara rinci. Catatan-catatan mengenai data tersebut dibagi dalam dua bentuk. Pertama adalah catatan yang berbentuk deskriptif, berisi uraian rinci, akurat dan komprehensif tentang berbagai hal yang didengar, dilihat dan dialami peneliti (berkaitan dengan permasalahan) di lokasi penelitian. Catatan kedua berbentuk reflektif, berisi kesan, pendapat, tafsiran, gagasan, kecurigaan dan pertanyaan yang timbul pada diri peneliti terhadap informasi atau data yang diperoleh. Catatan kedua ini cukup penting untuk pencarian data lebih lanjut dan untuk menganalisis hasil (Faisal, 1991 : 55)

### **G. Analisis data**

Sebagaimana prosedur kualitatif dilaksanakan, maka penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan proses berpikir





induktif. Mengacu pada konsep Moleong (2000:5) teknik kualitatif-induktif ini digunakan dengan alasan (1) dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda seperti yang terdapat dalam data, (2) lebih dapat membuat hubungan peneliti dan responden (subjek penelitian) menjadi eksplisit, (3) dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya, (4) dapat menemukan pengaruh-pengaruh yang mempertajam suatu hubungan, (5) dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analisis.

Langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah menghitung rasio kontribusi *Tax Effort*, efektifitas dan efisiensi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diperoleh Kabupaten Blora melalui Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Blora terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah. Analisis Rasio dari ketiga faktor yang memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat kita lihat sebagai berikut :

#### **a. Analisis *Tax Effort* ( Upaya Pajak)**

Upaya Pajak (*Tax Effort*) digunakan untuk melihat besaran kemampuan daerah dalam membayar pajak. Pada saat PDRB suatu daerah meningkat, kemampuan daerah dalam membayar pajak semakin tinggi dan ini berarti bahwa administrasi penerimaan pajak meningkat.

Upaya pajak tersebut diformulasikan sebagai berikut :

( Penerimaan Pajak )

$$\text{Upaya Pajak ( Tax Effort )} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Kriteria analisis yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

| <b>PKB – BBNKB</b>   |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>KATEGORI</b>      | <b>TAX EFFORT (%)</b> |
| <b>Sangat Rendah</b> | 0% - 25%              |
| <b>Rendah</b>        | 26% - 50%             |
| <b>Sedang</b>        | 51% - 75%             |
| <b>Tinggi</b>        | 76% - 100%            |

Sumber : Dipenda Propinsi Jawa Tengah

#### b. Analisis Efektifitas ( Hasil Guna )

Analisis Efektifitas ( hasil guna ) pajak ini digunakan untuk melihat besaran efektifitas pajak yang bersangkutan. Anggapan yang digunakan adalah semua wajib pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan membayar semua yang terhutang. Hasil guna pajak diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas ( Hasil Guna )} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Pajak}} \times 100\%$$

Kriteria analisis yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

| PKB – BBNKB   |             |
|---------------|-------------|
| KATEGORI      | EFEKTIFITAS |
| Sangat Rendah | 0% - 25 %   |
| Rendah        | 26% - 50 %  |
| Sedang        | 51% - 75%   |
| Tinggi        | 76% - 100%  |

Sumber : Dipenda Propinsi Jawa Tengah

### c. Analisis Efisiensi ( Daya Guna)

Analisis Efisiensi ( daya guna) pajak ini digunakan untuk mengukur besaran efisiensi pemungutan pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. Efisiensi ( daya guna ) pajak ini diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi ( Daya guna )} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak yang dipungut}} \times 100\%$$

Kriteria analisis yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

| PKB – BBNKB   |             |
|---------------|-------------|
| KATEGORI      | EFEKTIFITAS |
| Sangat Rendah | 0% - 25 %   |
| Rendah        | 26% - 50 %  |
| Sedang        | 51% - 75%   |
| Tinggi        | 76% - 100%  |

Sumber : Dipenda Propinsi Jawa Tengah

#### d. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi pajak daerah ini digunakan untuk mengukur besaran kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang diformulasikan sebagai berikut :

Realisasi Penerimaan Pajak

$$\text{Kontribusi PKB\_BBNKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dari hasil beberapa cara perhitungan tersebut diatas, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil wawancara sebagai analisis deskriptif berkaitan dengan hal – hal yang berkaitan dengan kontribusi dari ketiga faktor tersebut di atas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A . Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas di Propinsi Jawa Tengah, disamping sebagai koordinator pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Propinsi juga dituntut untuk selalu menggali obyek-obyek baru yang menjadi kewenangannya guna memasukkan pendapatan daerah disamping juga melaksanakan serta mengamankan Peraturan-Peraturan, kebijakan-kebijakan yang telah diprogramkan oleh Dinas.

Sebagai aparat dibidang pendapatan yang kesehariannya selalu dituntut untuk menggali, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara intensif yang dilaksanakan melalui mekanisme serta prosedur yang telah diatur sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.

Dalam penyusunan program kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Blora adalah dimaksudkan untuk mengadakan evaluasi apa yang sudah dikerjakan dan ke depan apa yang harus dikerjakan guna mencapai suatu kinerja yang lebih baik lagi. Sebagai unsur pelaksana di Daerah tentunya

di dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai kekurangan, hambatan serta suka dan dukanya.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan tugas pungutan dibidang pendapatan daerah, pedoman yang harus selalu dipegang ada beberapa target yang dibebankan untuk tiap-tiap jenis pungutan dan bagaimana realisasinya. Untuk itu dalam penyusunan program kerja ini yaitu dengan mengedepankan hasil nyata yang telah dicapai dalam tahun anggaran 2003 agar nantinya target yang dibebankan pada UPPD Kabupaten Blora betul-betul dapat direalisasi dengan baik, bahkan dapat melampaui target yang diharapkan oleh Dinas.

Sedangkan tujuan disusunnya program kerja UPPD Kabupaten Blora, adalah untuk mengukur kembali kinerja yang telah dicapai pada tahun anggaran yang lalu dan pada gilirannya yaitu pada tahun anggaran yang akan datang untuk lebih meningkatkan diri dengan segala kesiapan, baik personal, sarana dan prasarana, mobilitas serta tentunya untuk lebih mendukung. Pelaksanaan tugas kedepan perlu kiranya ada peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu apa yang kita harapkan dapat tercapai dan terrealisasikan sebagaimana yang menjadi VISI Dipenda yaitu “ Menjadi Dinas yang meampu mewujudkan Pendapatan Daerah yang optimal guna mendukung otonomi daerah dengan dilandasi pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat ” serta MISI yaitu “ Mengupayakan pencapaian target, meningkatkan koordinasi, meningkatkan kelancaran sistem,

melaksanakan pembinaan dan pengendalian, meningkatkan mutu pelayanan serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

### **A. 1. Landasan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak**

Dasar Hukum dalam pelaksanaan tugas pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah Propinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendapatan Daerah UPPD kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

1. Perda Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Perda Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Perda Propinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah (PPABT).
4. Perda Propinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPPAP).
5. Perda Propinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 1984 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (SP. III).
6. Perda Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan.
7. Perda Propinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2001 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah.

## **A. 2. Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah ( UPPD )**

### **Kabupaten Blora**

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, salah satunya UPPD kabupaten Blora yang dibentuk dengan susunan organisasi sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 1 tahun 2002 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan tugas teknis Dinas Pendapatan Daerah
2. Melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan pendapatan daerah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut UPPD mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah.
2. Pengkajian dan analisis teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.
4. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.
5. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan.



6. Pelaksanaan koordinasi pungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya.
7. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dinas.
8. Pelayanan ketatausahaan.

Kepala Unit memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan membawahkan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Seksi Pajak Bukan Kendaraan Bermotor, seksi Retribusi dan Penerimaan lain-lain serta Seksi Penagihan dan Pelaporan.

#### **A. 2. 1. Perincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi**

##### **1. Sub Bagian Tata Usaha.**

###### **a Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan :**

Surat menyurat, arsip, ekspedisi, pengadaan, kepegawaian, perlengkapan dan pembekalan, rumah tangga, dokumentasi dan informasi, perjalanan dinas, perpustakaan dan humas, absensi dan administrasi apel

###### **b Menyusun laporan kepegawaian**

###### **c Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit**

##### **2. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor.**

###### **a Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan :**

Pungutan PKB dan BBNKB, monitoring dan pelaporan, pemberian fiskal antar daerah, pajak hilang, pengiriman Super KPKB.

- b Melaksanakan administrasi dan teknis operasional.
- c Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.

### 3. Seksi Pajak Bukan Kendaraan Bermotor.

- a Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan :  
Administrasi, monitoring dan laporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), PABT, P3AP.
- b Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait
- c Inventarisasi data obyek P2ABT dan P3AP.
- d Merencanakan potensi penerimaan P2ABT dan P3AP.
- e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.

### 4. Seksi Retribusi dan Penerimaan Lain-lain.

- a Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan :  
Administrasi, monitoring dan laporan RTPHH, SP III Dealer dan penjualan kayu Perhutani, sanksi kelebihan muatan Jembatan Timbang (DLLAJ), kekayaan daerah, DPU Bina Marga, Dinas Pengairan, PBB, HAT, PBHTB.
- b Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.
- c Melaksanakan pencocokan hasil penerimaan secara periodik.

d Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.

5. Seksi Penagihan dan Pelaporan

a Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan :

Menyiapkan bahan, merencanakan kegiatan teknis operasional penagihan tunggakan PKB/BBNKB, P2ABT, P3AP, kendaraan luar Propinsi di broker, BUMN/ Pengusaha angkutan pencocokan penerimaandan setoran.

b Melaksanakan administrasi, monitoring dan pelaporan.

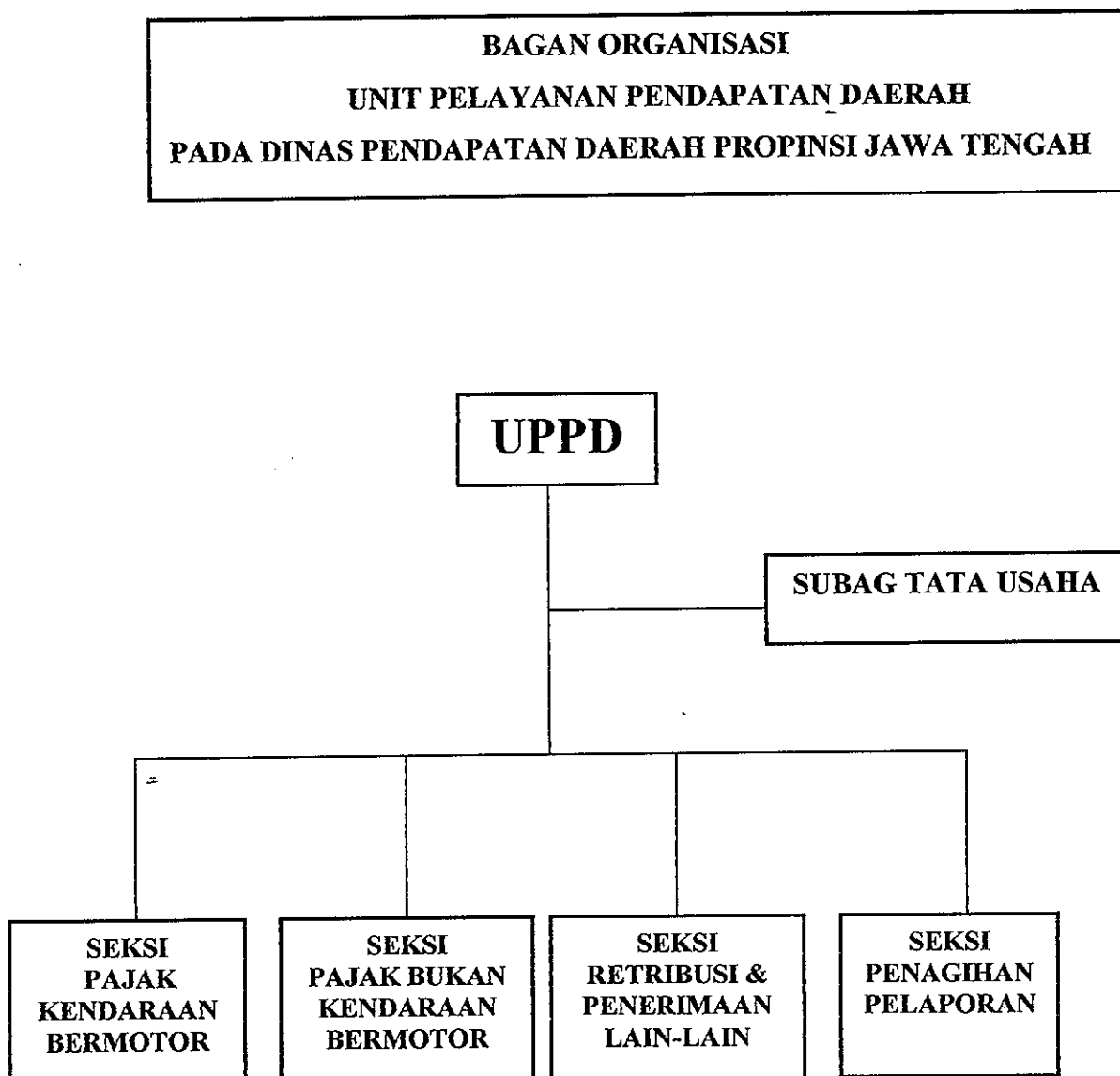
c Menyusun laporan kegiatan kerja UPPD, Evaluasi PAD.

d Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.

### A. 2. 2. Bagan Organisasi

Bagan Organisasi Unit Pelayanan pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 sebagai berikut :

**Gambar 2**



### **A. 2. 3. Arah Kebijakan UPPD**

1. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan Anggaran pendapatan daerah khususnya secara optimal.
2. Mengimplementasikan Tupoksi, Visi dan Misi yang telah ditetapkan seefisien mungkin.
3. Memobilisir sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan
4. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman, aman dan mantan.
5. Mengevaluasi pelaksanaan Perda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### **A. 2. 4. Rencana Kegiatan Tahunan**

#### **a Peningkatan Unsur-unsur Manajemen.**

##### **- Sumber Daya Manusia ( Man ).**

Yaitu perlunya peningkatan kualitas personal baik kemampuan maupun etos kerjanya dan kedisiplinan yang akhirnya bermuara pada produktivitas kerja yang diharapkan bisa optimal.

##### **- Sarana Kerja.**

Yaitu dengan memperhatikan kepedulian pemeliharaan sarana yang ada ataupun adanya penambahan sarana baru dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien.

- Administrasi dan Pelayanan ( Method ).

Yaitu adanya tertib administrasi sesuai ketentuan dan mekanisme yang ada dan mutu pelayanan yang mengarah pada sasaran, cepat dan memuaskan.

- Sarana Keuangan ( Money ).

Perlu adanya upaya pengembalian untuk pengeluaran-pengeluaran yang semestinya.

- Mesin-mesin / Komputer ( Machine ).

Teknologi membantu kelancaran pelaksanaan tugas, percepatan dan data yang akurat.

- Pemasaran ( Market ).

Adanya kepercayaan dan kepuasan dalam pelayanan masyarakat wajib pajak yang membayar PKB/BBNKB.

b Melaksanakan Fungsi-fungsi Manajemen

- Perencanaan

Memadukan bottom up planning dan top down planning untuk dikoordinasikan sesuai mekanisme.

- Pengorganisasian

Mengorganisir orang-orang / staf untuk bekerja bersama dengan instansi terkait Jasa Raharja dan Poltas untuk mencapai tujuan

yaitu peningkatan pelayanan yang sangat memuaskan kepada para wajib pajak.

- Pelaksanaan

Peningkatan usaha intensifikasi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain.

- Pengkoordinasian

Perlunya peningkatan koordinasi dengan unsur-unsur terkait dalam mekanisme samsat maupun dengan Dinas / Instansi terkait pemungut pendapatan daerah.

- Pengawasan

Adanya pembinaan yang terus menerus dalam upaya dan usaha pencegahan secara dini kemungkinan terjadinya kebocoran dibidang pendapatan daerah baik pembinaan teknis administrasi maupun teknis operasional.

#### **A. 2. 5. Rencana Operasional.**

- Rencana operasional yang akan ditempuh UPPD kabupaten Blora secara garis besar antara lain :

1. Bidang Personal.

- Menyiapkan personal sesuai dengan persyaratan dan berpotensi untuk diikutkan pendidikan, kursus-kursus ataupun penataran.

- Bila memungkinkan diadakan job rotation antar pelaksana menurut kebutuhan dan upaya pendayagunaannya secara optimal.
- Upaya tertib administrasi kepegawaian sesuai aturan yang berlaku.
- Operasional tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui operasi door to door dan pendataan kendaraan bermotor dari luar daerah Propinsi Jawa Tengah.
- Upaya peningkatan disiplin dan produktivitas kerja melalui pembinaan-pembinaan.

2. Bidang Sarana Materiil.

- Upaya menghasilkan penyediaan barang inventaris dan barang habis pakai sesuai kebutuhan.

3. Bidang Sarana Keuangan.

- Adanya penyediaan biaya guna menunjang kegiatan operasional PKB / BBNKB sesuai potensi.

4. Bidang Pendapatan

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak yang membayar/meyelesaikan PKB/BBNKB.



- Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan unsur-unsur terkait dan dinas/instansi pemungut pendapatan daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten dan Unit Propinsi Jawa Tengah.
- Melaksanakan kegiatan intensifikasi pungutan pajak dan retribusi Daerah.

#### A. 2. 6. Perkembangan Realisasi PAD.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah UPPD Kabupaten Blora tahun anggaran 1997 – 2001 sebagai berikut:

**Tabel 3**

Perkembangan PAD Propinsi Jawa Tengah UPPD Kabupaten Blora  
( tahun anggaran 1997 – 2001)

| NO | TH. ANGGARAN | TARGET            | REALISASI         | %      |
|----|--------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1. | 1997/1998    | 4.756.988.000,00  | 4.678.442.973,00  | 98,35  |
| 2. | 1998/1999    | 3.194.529.000,00  | 3.556.428.225,00  | 111,33 |
| 3. | 1999         | 4.183.502.000,00  | 3.988.078.655,00  | 95,33  |
| 4. | 2000         | 5.246.168.220,00  | 7.038.763.425,00  | 134,17 |
| 5. | 2001         | 11.635.210.550,00 | 13.623.112.642,00 | 117,09 |

Sumber: Data Realisasi PAD UPPD Kab. Blora 1997 – 2001 ( diolah).

### A. 2. 7. Kebutuhan Sarana dan Biaya.

Kebutuhan sarana kantor untuk tahun anggaran 2003 yang meliputi kebutuhan inventaris. Barang habis pakai dan belanja rutin adalah sebagai berikut :

#### 1. Kebutuhan barang inventaris.

- Kursi Kerja Samsat Pembantu Cepu
- Kursi Kerja Pimpinan
- Kendaraan Roda 4 Dinas baru
- Kendaraan Roda 2 Dinas 2 buah

#### 2. Kebutuhan Barang Habis Pakai.

Alat Tulis Kantor (ATK), blanko dinas, blanko pajak, blanko Retribusi dan Pendapatan lain-lain .

#### 3. Kebutuhan Belanja Rutin.

Untuk kebutuhan belanja rutin tahun 2003 diproyeksikan sebagai berikut :

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| - Belanja barang           | Rp. 64.658.400,00        |
| - Upah piket SATPAM        | Rp. 2.880.000,00         |
| - Belanja pemeliharaan     | Rp. 22.988.400,00        |
| - Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 10.350.000,00        |
| - Belanja lain-lain        | <u>Rp. 21.216.000,00</u> |
| Jumlah seluruhnya          | Rp. 122.092.800,00       |

### **A. 3. Gambaran Umum Sekitar Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) merupakan modal bagi daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan . Secara teknis kegiatan penggalan PAD ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah ( Dipenda ). Kegiatan yang dilakukan oleh Dipenda ini merupakan tugas pokok yang merupakan tanggung jawab organisasi dengan memberdayakan segenap unsur di dalamnya.

Nuansa penyusunan program kerja Tahun Anggaran 2003 sangat dipengaruhi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pedoman Pentausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, yang pada dasarnya sudah tidak ada lagi dikotomi pengertian yang berkaitan dengan Belanja rutine dan Pembangunan.

= Dengan naiknya harga BBM pada awal tahun 2003 sudah barang tentu akan mempengaruhi secara keseluruhan sendi-sendi perekonomian nasional seperti kenaikan harga barang dan jasa serta inflasi yang pada gilirannya nanti akan mempengaruhi daya beli masyarakat serta dimungkinkan dapat secara langsung memberikan dampak luas terhadap anggaran daerah.

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Dengan demikian Anggaran daerah harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat, untuk mewujudkan keadaan tersebut perlu perhatian khusus dari Pemerintah Daerah guna mengambil langkah-langkah kegiatan dan menggariskan kebijakan yang mengarah secara langsung dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan APBD disamping mengacu pada Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 105 Tahun 2002 juga tetap berpodoman pada :

a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Transparansi anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan Pemerinthan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Untuk itu setiap dana yang diperoleh penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

b. Disiplin Anggaran

Anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan tepat dipertanggungjawabkan.

#### c. Keadilan Anggaran

Pembiayaan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui mekanisme perpajakan dan retribusi yang dipikul segenap lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

#### d. Efisiensi dan Efektifitas

Dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Penyusunan Program Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, dimaksudkan untuk merumuskan rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan Operasional dan Administrasi serta kegiatan-kegiatan selama kurun waktu satu tahun anggaran. Disamping sebagai bagian dari Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah juga dapat dipakai sebagai bahan untuk menciptakan keseragaman pola pikir dan tindak bagi segenap jajaran aparat Dinas Pendapatan Daerah Jawa Tengah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai pedoman dan petunjuk praktis dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat dicapai hasil yang optimal.

Program Kerja ini disusun dengan tujuan agar dapat tercipta kesinambungan kegiatan dari tahun yang lalu dengan tahun yang akan datang dalam rangkaian upaya peningkatan kualitas aparat pemungut Pendapatan Daerah yang berdedikasi, bersih dan berwibawa serta dalam upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan, disamping meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakuakn oleh Dinas Pendapatan daerah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Dinas Teknis daerah salah satunya Unit Pelayanan Pendapatan Daerah ( UPPD ). Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001, tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, ditegaskan bahwa tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah antara lain :

- a. Melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pendapatan Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Melaksanakan kewenangan dibidang Pendapatan Daerah yang bersifat lintas Kabupaten / Kota;
- c. Melaksanakan kewenangan Kabupaten / Kota dibidang Pendapatan Daerah yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut diatas Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada Propinsi;
- d. Pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi pungutan daerah di Jawa Tengah;
- e. Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang urusannya diserahkan kepada Propinsi;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah;
- g. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

### **A. 3. 1. Strategi Pungutan Pajak Sebagai Salah Satu Sumber PAD**

Dalam upaya peningkatan pendapatan, daerah mencoba menggali sumber pendapatan diantaranya melalui pungutan pajak. Upaya pungutan pajak sebagai salah satu sumber PAD ini memerlukan strategi yang kiranya dapat optimal menghasilkan pajak yang menjadi salah satu sumber

pendapatan daerah. Strategi yang diterapkan dalam melakukan pungutan pajak sebagai salah satu sumber PAD ini antara lain :

1. Peningkatan pelayanan dengan mendekatkan tempat pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah ( UPPD ) di setiap Kabupaten / Kota dan Kantor Bersama Samsat;
2. Perbaikan dan penyederhanaan sistem Administrasi secara terus menerus;
3. Evaluasi berbagai Peraturan Daya Manusia secara kontinyu;
4. Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan Instansi terkait dan pihak ketiga.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang disertai dengan krisis kepercayaan atas kebijakan Pemerintah telah menyebabkan angka pengangguran dan penduduk miskin meningkat secara tajam yang berakibat daya beli masyarakat menurun. Terlebih dengan adanya kenaikan harga BBM dan adanya rumor tarif dasar listrik serta tariff telpon semakin mempengaruhi keseluruhan sendi sendi perekonomian nasional, kondisi ini sudah barang tentu menuntut adanya perubahan disegala bidang yang meliputi bidang ekonomi, politik, social dan budaya serta kebijakan anggaran baik dalam konstalasi nasional maupun daerah.



Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai ujung tombak proses pembangunan daerah harus peka terhadap tantangan dan dinamika masyarakat yang menuntut reorientasi sikap, perilaku dan kultur birokrasi. Oleh karena itu dalam Tahun 2003, Pemerintah Daerah secara umum harus menunjukkan niatnya untuk memenuhi aspirasi masyarakat, khususnya dalam upaya pemulihan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara cepat serta mendudukkan kembali hak-hak masyarakat atas pemenuhan fasilitas pelayanan umum dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan dimasa lalu.

Dengan memperhatikan perkembangan serta permasalahan tersebut diatas, maka beberapa langkah strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam program kerja yang akan datang ini adalah :

- a. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat, melalui penyederhanaan pungutan, efisiensi, biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum yang tegas bagi para penghindar pajak.
- b. Perencanaan terget penerimaan daerah khususnya PAD harus lebih realistis sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia dengan mempertimbangkan kondisi social ekonomi masyarakat.
- c. Menindak lanjuti ketentuan perpajakan dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Petunjuk

Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan inspirasi otonomi daerah dan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

#### **A. 3. 2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah khusus pasal 79, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
  1. Hasil Pajak Daerah;
  2. Hasil Retribusi Daerah;
  3. Hasil Perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
  4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Pinjaman daerah dan
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### **A. 4. Perkembangan Kontribusi PAD Propinsi terhadap APBD Propinsi Jawa Tengah.**

Sebagai modal dasar pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan peranan Pendapatan Asli Daerah sangatlah penting, sehingga perlu dimobilisasi dengan

cermat agar dapat ditingkatkan mantapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. . Perkembangan Pendapatan Asli daerah Propinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun terakhir seperti tersebut dibawah ini :

**Tabel 4**

Perkembangan PAD Prop. Jateng Tahun 1997 / 1998-2001

| NO | TH.ANG    | PAD             | NAIK / TURUN    | %     |
|----|-----------|-----------------|-----------------|-------|
| 1  | 2         | 3               | 4               | 5     |
| 1. | 1997/1998 | 364.772.198.992 | -               | -     |
| 2  | 1998/1999 | 245.758.513.993 | 119.013.684.999 | 32,63 |
| 3  | 1999/2000 | 318.555.244.264 | 72.796.730.271  | 29,62 |
| 4  | 2000      | 505.660.011.602 | 187.104.767.338 | 58,74 |
| 5  | 2001      | 832.260.986.978 | 326.600.975.376 | 64,59 |

Sumber data : Kasda Jateng

Kebutuhan Dana untuk pembiayaan kegiatan pembangunan Daerah akan terus meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan tuntutan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan dana tersebut dipenuhi dari Pemerintah Pusat melalui APBD sektoral serta bentuk alokasi dana lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, dana dari Pendapatan Asli Daerah, pinjaman Pemerintah Daerah yang ditampung dalam APBD.

Sedangkan perkembangan kontribusi PAD dan Bagi Hasil terhadap APBD Propinsi Jawa Tengah selama 5 ( lima ) tahun terakhir seperti tersebut dibawah ini :

**Tabel 5**

Kontribusi PAD dan Bagi hasil terhadap APBD Prop.Jateng 1997/1998-2001

| NO | TH.AGG    | PAD + BG.HSL    | APBD              | %     |
|----|-----------|-----------------|-------------------|-------|
| 1  | 2         | 3               | 4                 | 5     |
| 1  | 1997/1998 | 398.577.454.866 | -                 | -     |
| 2  | 1998/1999 | 288.962.803.531 | 591.840.000.000   | 48,82 |
| 3  | 1999/2000 | 368.391.346.984 | 941.718.526.000   | 39,11 |
| 4  | 2000      | 561.019.005.215 | 923.500.005.000   | 60,74 |
| 5  | 2001      | 952.276.396.214 | 1.796.812.993.000 | 52,98 |

Sumber data : Kasda Jateng

#### **A. 5. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD**

Didalam upaya peningkatan PAD ditemui beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya peningkatan PAD, antara lain :

##### **1. Faktor Intern**

Untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maka perlu segera disiapkan landasan hukum tentang Perda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Kapabiliti dan kapasitas kerja sumber daya aparatur agar memiliki keahlian dan ketrampilan yang memadai dibidang pengelolaan pendapatan daerah pada khususnya dalam memasuki era otonomi daerah yang menuntut adanya perbaikan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia perlu disertai dengan peningkatan etos, budaya dan disiplin kerja yang peka terhadap tuntutan masyarakat saat ini, perlu diupayakan secara terus menerus.

Sarana / prasarana yang tersedia khususnya yang berdampak pada peningkatan penerimaan daerah dirasa masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas.

## 2. Faktor Ekstern :

Penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang lebih demokratis, transparan dan partisipatif sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan masyarakat, pemerintah dan pembangunan di Daerah masih dalam proses pengkajian dan perencanaan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memprihatinkan akibat krisis moneter yang berkepanjangan. Tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya selaku wajib bayar masih perlu diupayakan secara terus menerus dengan peningkatan pelayanan dan suri tauladan.

Terbatasnya jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut karena sudah diterapkan secara limitative, hal ini mengakibatkan terbatasnya pula potensi pajak dan retribusi daerah yang dapat digali oleh Daerah.

- Hal - lain yang dilakukan secara eksternal dalam upaya peningkatan hasil pajak bagi daerah adalah melakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi dengan unit-unit kerja pemungut PAD agar dicapai kesatuan langkah. dengan harapan akan mencapai kinerja yang optimal.

## **B. Hasil Penelitian**

Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti mencoba mencari informasi yang cukup berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Beberapa hal yang terkait dalam penelitian ini, peneliti coba memotret hal – hal yang relevan dengan kondisi Kabupaten Blora, upaya dan peran UPPD kabupaten Blora dalam menggali Pendapatan Asli Daerah.

### **B.1. Kondisi Kabupaten Blora**

Wilayah kerja Kantor UPPD Kabupaten Blora terdiri dari 1 (satu) wilayah Kabupaten yang meliputi 16 Kecamatan dengan luas 1.820,59 km atau sekitar 5,5 % luas wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk, pada akhir tahun 2002 di Kabupaten Blora sebanyak 826,229 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 407,921 jiwa dan penduduk perempuan 418,308 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki dengan sex ratio sebesar 98 %.

Kabupaten Blora senantiasa tumbuh penduduknya dengan tingkat pertumbuhan penduduk dalam tahu tersebut sebesar 0,97 % per tahun dalam satu dasawarsa terakhir. Kepadatan penduduk Kabupaten Blora sebesar 452 jiwa/km<sup>2</sup>, jauh di bawah tingkat kepadatan penduduk Propinsi Jawa Tengah

(1997 tercatat sebesar 919 jiwa/km<sup>2</sup>), wilayah terpadat penduduknya adalah kecamatan Cepu dengan tingkat kepadatan 1.505 jiwa/km<sup>2</sup>.

Apabila tinjauan kependudukan dilihat dari penduduk yang berusia 10 tahun ke atas menurut kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu, maka sebagian besar penduduk Kabupaten Blora berada pada kelompok bekerja dengan jumlah sebesar 441.512 jiwa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6**

**Kegiatan Penduduk Kabupaten Blora Usia 10 Tahun Keatas**

Per Juli 2002

| No | Kegiatan                 | Jumlah  | Presentase |
|----|--------------------------|---------|------------|
| 1  | C. Angkatan Kerja        |         |            |
|    | a. Bekerja.              | 441.512 | 64,81      |
|    | b. Mencari Pekerjaan     | 18.464  | 2,71       |
|    | Jumlah                   | 459,976 | 57,52      |
| 2  | D. Bukan Angkatan Kerja  |         |            |
|    | a. Sekolah               | 88.729  | 13,02      |
|    | b. Mengurus Rumah Tangga | 86.062  | 12,63      |
|    | c. Lainnya               | 46.504  | 6,83       |
|    | Jumlah                   | 221.295 | 32,48      |
|    | Total                    | 681.271 | 100        |

Sumber : Profil Angkatan Kerja Daerah Kab.Blora (Hasil Sakerda),2001



Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Blora adalah sebesar 459,976 orang (67,52%), sedangkan bukan angkatan kerja hanya sekitar 221.295 orang (32,48%). Hal ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan (dependency ratio) sebesar 48,11%.

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indicator yang menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Blora yang berumur 10 tahun ke atas (penduduk usia kerja). Di Kabupaten Blora pada Tahun 2002 tingkat partisipasi angkatan kerja adalah sebesar 68,80%.

Apabila tinjauan kependudukan dilihat dari penduduk yang berusia 10 tahun ke atas menurut lapangan pekerjaan utama, maka sebagian besar penduduk Kabupaten Blora berada pada kelompok bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 324.065 jiwa (73,40 %).

Urutan kedua adalah sektor perdagangan yaitu sebanyak 50.149 jiwa (11,36%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7. berikut :

**Tabel 7**  
**Penduduk Kabupaten Blora Berumur 10 Tahun Keatas**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002**

| No | Lapangan Pekerjaan             | Jumlah  | Persentase |
|----|--------------------------------|---------|------------|
| 1  | Pertanian                      | 324.065 | 73,40      |
| 2  | Pertambangan dan Galian        | 1.430   | 0,32       |
| 3  | Industri                       | 17.655  | 4,00       |
| 4  | E. Listrik, Gas dan Air Bersih | 0       | 0          |
| 5  | Konstruksi                     | 5.438   | 1,23       |
| 6  | Perdagangan                    | 50.149  | 11,36      |
| 7  | Komunikasi                     | 8.625   | 1,95       |
| 8  | Keuangan                       | 830     | 0,19       |
| 9  | Jasa                           | 33.320  | 7,55       |
|    | Jumlah                         | 441.512 | 100        |

Sumber : Profil Angkatan Kerja Daerah Kab.Blora (Hasil Sakerda),2001.

Disamping kondisi penduduk potret kondisi sosial dan ekonomi Kab. Blora dapat kami kemukakan bahwa pembangunan kesejahteraan social bertujuan mengangkat harkat dan martabat penduduk miskin dan kelompok rawan social. Berdasarkan pendataan yang dilaksanakan Kantor BKKBN Kabupaten Blora terdapat keluarga pra sejahtera ( Pra KS ) sebanyak 119.353

(57,61 %) dengan rincian 62.278 KK Pra KS alasan ekonomi 57.075 KK Pra KS alasan non ekonomi (Rentra Kabupaten Blora 2002-2003).

Peningkatan kesejahteraan penduduk perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana sosial, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, perhubungan, perdagangan, olah raga dan kesenian, serta keamanan dan ketertiban.

Sarana kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Blora terdiri dari dua buah rumah sakit yang dikelola swasta, terletak di Kecamatan Cepu dan Kecamatan Blora. Sedangkan sarana kesehatan yang lain yaitu puskesmas berjumlah 26 buah dan didukung puskesmas berjumlah 55 buah yang tersebar di semua Kecamatan. Fasilitas lainnya adalah balai Pengobatan sebanyak delapan buah dan apotik sebanyak tujuh buah. Sedangkan tenaga medis meliputi dokter 57 Orang, perawat 143 orang dan bidan 192 orang.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas pendidikan. Banyaknya Sekolah Dasar di Kabupaten Blora tahun 2002 adalah 662 buah, dengan jumlah murid 97.787 dan jumlah guru adalah 4.803 orang ; banyaknya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah 75 dengan jumlah murid 31.641 siswa, dan jumlah guru 1.594 orang ; banyaknya Sekolah Menengah Lanjutan Atas adalah 40 dengan jumlah murid adalah 18.139 siswa dan guru 1.089 orang.

Sedangkan banyaknya Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora adalah 3 buah dengan jumlah mahasiswa adalah 1.825 laki-laki dan 584 perempuan yang diampu oleh 211 dosen laki-laki dan 87 dosen perempuan dengan jumlah kelulusan sebanyak 471 mahasiswa.

Sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Blora mencapai 3.776 buah yang terdiri dari 98,36% tempat ibadah umat Islam, 1,22 % untuk umat Kristen, 0,34 % untuk Katholik, dan sisanya untuk Hindu/Budha.

Sarana Perhubungan yang ada di Kabupaten Blora meliputi jalan dan sarana komunikasi (telepon). Sarana jalan terdiri dari jalan Propinsi, jalan Kabupaten dan jalan Kecamatan. Sarana jalan ini sepanjang 97,51 km yang dikelola oleh DPU Kabupaten Blora. Menurut kondisinya jalan Propinsi merupakan jalan beraspal dengan kondisi baik 27,45 %, kondisi sedang 51,59% dan sisanya dalam keadaan rusak. Untuk jalan Kabupaten 81 % dan sisanya adalah jalan tanah ; dengan kondisi jalan yang rusak mencapai 29,81 %.

Sedangkan untuk sarana komunikasi di Kabupaten Blora antara lain telepon yang dilayani dalam 4 sentral telepon otomatis (STC) yaitu STO Randublatung, STO Cepu, STO Blora, dan STO Ngawen ; dan pos yang melayani surat-menyurat, wesel pos, dan fasilitas tabungan Takesra dan Kukesra.

Sarana Perdagangan yang ada di Kabupaten Blora terdiri dari Koperasi Unit Desa sebanyak 17 unit dengan anggota 55.000 orang yang bekerja sama dengan DOLOG menyediakan pembelian dan pengadaan beras ; dan Pasar

sebanyak 53 buah dengan jenis pasar yang terbanyak adalah pasar tradisional yang berada di daerah pedesaan.

Sarana olahraga yang ada di Kabupaten Blora dapat dilihat dari banyaknya lapangan olah raga yang terdiri dari lapangan sepak bola 110 buah, tennis lapangan 22 buah, bulu tangkis 108 buah, bola volley 380 buah, dan golf 2 buah. Sedangkan kesenian yang ada di Kabupaten Blora meliputi kesenian modern yang terdiri dari 4 kelompok band, kesenian klasik terdiri dari 73 group karawitan dan 73 swarawati, kesenian rakyat dengan 29 group terbang dan 2 group kentrung, kesenian kreasi baru dengan 8 group keroncong dan 15 group orkes melayu serta 5 group campursari, wayang kulit 56 group, wayang krucil 7 group, wayang golek 19 group, Ketoprak 10 group, barongan 124 group, dan tayub 119 group.

Sarana keamanan dan ketertiban yang ada di Kabupaten Blora tahun 2002 terdiri dari Aparat Kepolisian sebanyak 532 personil, Hansip/Linmas sebanyak 27.866 orang, dan Satpol Pamong Praja 139 orang.

Sedangkan untuk melihat gambaran secara makro bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Blora pada Tahun 2002 telah dihitung PDRB sebagai salah satu indikator perencanaan. PDRB Kabupaten Blora pada tahun 2002 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.565.662 milyar rupiah dan atas dasar harga konstan tahun 1994 adalah 710.703 milyar rupiah. Selama kurun waktu tujuh tahun terakhir dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2002, PDRB Kabupaten Blora mengalami kenaikan 2,48 kali lipat, sedangkan secara riil (konstan) hanya

mengalami kenaikan sebesar 1,13 kali lipat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel . Struktur perekonomian Kabupaten Blora berdasarkan perhitungan PDRB tahun 2002 (harga konstan 1994) adalah agraris, yang berarti sektor primernya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 45,48 %. Kontribusi sektor pertanian ini mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 terus mengalami kenaikan (45,0 %), tetapi pada tahun 1999 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,01 % (menjadi 45,00 %) dan pada tahun 2001 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,28 % (menjadi 45,28 %).

**Tabel 8.**  
**PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 1994**  
**Serta Perkembangannya**  
**Kabupaten Blora Tahun 1994-2002**

| Tahun | PDRB Adh Berlaku            |                          | PDRB Adh Konstan 1994       |                          |
|-------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       | Nilai<br>(Jutaan<br>rupiah) | Perkem-<br>bangan<br>(%) | Nilai<br>(Jutaan<br>rupiah) | Perkem-<br>bangan<br>(%) |
| 1994  | 631.751,70                  | 100,00                   | 631.751,70                  | 100,00                   |
| 1995  | 695.112,11                  | 110,03                   | 647.855,30                  | 102,55                   |
| 1996  | 762.454,29                  | 120,69                   | 676.178,43                  | 107,03                   |
| 1997  | 828.339,74                  | 131,12                   | 703.277,83                  | 111,32                   |
| 1998  | 999.302,93                  | 158,18                   | 723.543,19                  | 114,53                   |
| 1999  | 1.343.799,12                | 212,71                   | 683.905,22                  | 108,26                   |
| 2000  | 1.433.106,14                | 226,85                   | 693.069,26                  | 109,71                   |
| 2001  | 1.656.661,47                | 247,83                   | 710.703,43                  | 112,50                   |
| 2002  | 1.676.204,76                | 265,33                   | 723.134,79                  | 114,50                   |

Sumber : BPS Kabupaten Blora (PDRB 2002)

Sektor dominan kedua adalah sektor perdagangan yang memberikan kontribusi sebesar 17,49 %. Sektor dominan yang ketiga adalah sektor jasa-jasa yang memberikan kontribusi sebesar 12,15 %.

## **B. 2. Upaya dan Peran UPPD Kabupaten Blora dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).**

Didalam penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah UPPD Kabupaten Blora merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPPD pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok, yaitu :

1. Melaksanakan Tugas teknis Dinas Pendapatan Daerah
2. Melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan pendapatan Daerah
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah;



2. Pengkajian dan analisis teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
4. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain;
5. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
6. Pelaksanaan koordinasi pungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya;
7. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
8. Pengelolaan ketatausahaan;

Adapun Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dipimpin oleh Kepala Unit yang membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Seksi Pajak Bukan Kendaraan Bermotor;
4. Seksi Retribusi dan Penerimaan lain-lain;
5. Seksi Penagihan dan Pelaporan;

### **B.2.1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dalam APBD**

Secara garis besarnya, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah telah ditentukan didalam pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang meliputi :

- Hasil pajak daerah
- Hasil retribusi daerah
- Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- Dana perimbangan
- Pinjaman Daerah dan
- Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, UPPD Kabupaten Blora yang berhasil digali dalam tahun anggaran 2002 juga berasal dari sumber-sumber yang telah diatur didalam pasal 79 tersebut.

Dalam rangka meningkatkan/menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat 4 (empat) macam pos penerimaan yang dikelola UPPD Kabupaten Blora meliputi :

- Pos Pajak Daerah
- Pos Retribusi Daerah
- Pos Pendapatan Lain-lain
- Pos Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak

a. Pos Pajak Daerah

Di dalam pos pajak daerah ini jenis pungutan yang merupakan primadona dalam meningkatkan PAD tersebut terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( P BBN KB)
- Pajak Air Bawah Tanah ( PABT)
- Pajak Air Permukaan (PAP)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBBKB)

b. Pos Retribusi Daerah

Di dalam pos retribusi daerah ini antara lain terdiri dari :

Yang dipungut langsung oleh UPPD, yaitu :

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan (RTPHH)

Yang tidak dipungut langsung, yaitu :

- DPU ( Sewa tanah jalan dan bangunan serta sewa alat – alat berat)
- PDE
- DLLAJ ( Sanksi kelebihan muatan dari jembatan timbang )

- c. Pendapatan Lain-lain terdiri dari :
  - Sumbangan Pihak ke 3 ( dealer )
  - Sumbangan Pihak ke 3 ( Perhutani )
  - Bunga Deposito
- d. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari :
  - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - Hak Atas Tanah ( HAT )
  - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB).

#### **B.2.2. Upaya-upaya UPPD Kabupaten Blora dalam menggali PAD**

Di dalam penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, UPPD Kabupaten Blora merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting. UPPD Kabupaten Blora yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPPD Kabupaten Blora, merupakan unsur pelaksanaan pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah di bidang Pendapatan Daerah.

- Secara garis besar, upaya-upaya penggalan dana dari sumber-sumber PAD oleh UPPD Kabupaten Blora dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. Intensifikasi dan
- b. Ekstensifikasi

Dalam melaksanakan upaya penggalian yang pertama yaitu intensifikasi, langkah-langkah yang diupayakan meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Mengadakan pengarahan dan penempatan-penempatan pegawai

UPPD Kabupaten Blora di lingkup wilayah Kabupaten Blora :

- Wilayah Kabupaten Blora yang cukup luas, dengan 16 Kecamatan dan 295 desa/kelurahan dan letaknya cukup jauh dari pusat kota dimana Kantor UPPD Kabupaten Blora berada (ada yang berjarak lebih kurang 50 km dari pusat kota) untuk itu demi kelancaran peningkatan PAD khususnya pungutan PKB/BBN-KB dan pelayanan kepada masyarakat telah dibangun 2 lokasi Kantor Samsat di wilayah ex Kawedanan Ngawen, Blora / Kantor Samsat Blora (meliputi 9 Kecamatan) dan Ex Kawedanan Randublatung, Cepu/Kantor Samsat Pembantu Cepu ( meliputi 7 Kecamatan ). Adapun jarak Kantor UPPD Kabupaten Blora ke Kantor Samsat Pembantu Cepu kurang lebih 15 km.
- Jumlah pegawai UPPD Kabupaten Blora yang relatif belum memadai dibandingkan dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian diharapkan penempatan pegawai-pegawai UPPD Kabupaten Blora tersebut dapat sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya.

- b. Mengintensikan tenaga pesuruh maupun satpam sebagai pelaksana tugas pada Seksi Penagihan dan Pelaporan untuk mengadakan penagihan pajak/retribusi maupun peringatan kepada masing-masing Wajib pajak.
- c. Meningkatkan kualitas dan kemampuan dari para pegawai UPPD Kabupaten Blora dengan jalan mengadakan/memberikan bimbingan, pendidikan dan pelatihan ataupun penugasan untuk mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Dinas, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan produktifitas kerja pegawai dan pada akhirnya akan dapat melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dengan baik.

Selanjutnya untuk melaksanakan upaya yang kedua yaitu ekstensifikasi, hal-hal yang dilakukan antara lain :

- a. Sebagai unsur dan Pemerintah Daerah, UPPD Kabupaten Blora sesuai dengan kondisi keadaan saat ini dapat memberikan usul perubahan mengenai tarip yang ditentukan dalam suatu Perda, yang menurut pertimbangan sudah dianggap tidak relevan.

Hal tersebut harus melalui prosedur / penyusunan / perubahan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kepada DPRD.

Sebagai contoh dari upaya pemerintah Daerah dalam hal ini adalah dengan diberlakukannya :

1) Pos Pajak Daerah ;

- Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB ).

2) Pos Retribusi Daerah ;

- Perda No.9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Perda No. 3 Tahun 1999 tentang Pasar Grosir dan Pertokoan
- Perda No. 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian kelebihan Muatan

3) Pos Pendapatan lain - lain

- Perda No. 10 Tahun 1984 tentang Sumbangan pihak ketiga

4) Pos Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

- U.U No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- U.U No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Peraturan Menteri No. 7 Tahun 1973 tentang Pemberian Hak atas Tanah Negara

- b. Mengadakan “ rens silang “ atau tukar menukar satu informasi dengan daerah lain. Pertukaran informasi dengan jalan saling

memberikan salinan Peraturan Daerah khususnya yang ada kaitannya dengan PAD kepada daerah lain. Informasi yang diperlukan biasanya berupa jenis-jenis Pajak/retribusi daerah dalam Peraturan Daerah yang baru diberlakukan di daerah lain.

Dengan demikian akan dapat ditemukan sumber-sumber penerimaan daerah yang baru sebagai penunjang sumber-sumber penerimaan daerah yang baru sebagai penunjang sumber-sumber penerimaan yang telah ada.

c. Mengadakan studi banding ke daerah-daerah

Pada dasarnya tujuan pelaksanaan studi banding ini hampir sama dengan tujuan yang diharapkan pada upaya mengadakan “rens silang” seperti telah disebutkan diatas yaitu untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna meningkatkan PAD. Namun biasanya informasi yang didapatkan dalam studi banding ini lebih luas jika dibandingkan dengan pelaksanaan rens silang, karena didalam studi banding ini, informasi yang diperlukan dengan daerah yang dikunjungi tidak hanya mengenai hasil-hasil pajak/retribusi baru tetapi juga kondisi daerah yang bersangkutan.

### **B.2.3. Peranan UPPD Kabupaten Blora dalam menggali PAD.**

Untuk mengetahui peranan yang diberikan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam suatu anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat



dilakukan dengan jalan mengetahui berapa besar sumbangan yang diberikan oleh sumber-sumber PAD yang ada, guna menunjang pembiayaan pembangunan seperti yang telah digariskan dan dianggarkan di dalam APBD dalam tahun anggaran tertentu. Oleh karena itu dengan melihat masih rendahnya sumbangan yang diberikan oleh pendapatan yang asli berasal dari daerah itu sendiri maka yang perlu mendapat perhatian adalah dengan tetap meneruskan dan meningkatkan upaya-upaya selama ini, sedang ditempuh guna penggalan sumber-sumber PAD. Disamping itu juga mengamati kendala-kendala yang timbul dalam penggalan dana dari sumber-sumber PAD tersebut serta menemukan langkah-langkah untuk mengantisipasi dan menanggulangnya.

Sebagaimana telah disebutkan di depan unsur-unsur PAD UPPD Kabupaten Blora dalam Tahun Anggaran 2002 terdiri dari : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil penerimaan lain-lain dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Di dalam tahun anggaran 2002 tersebut sumbangan yang diberikan oleh unsur-unsur PAD dapat dilihat tabel 9. berikut :

**Tabel 9.**  
**Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )**  
**Tahun Anggaran 2002**

| No        | Jenis Pungutan                 | Target           | Realisasi<br>Rp  | Persen<br>tase |
|-----------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>I</b>  | <b>PAJAK DAERAH</b>            |                  |                  |                |
| 1         | PKB                            | 4.928.000.000,-  | 6.283.679.300,-  |                |
|           | Sanksi Administrasi            |                  | 71.126.900,-     |                |
|           | <b>Jumlah</b>                  | 4.928.000.000,-  | 6.354.806.200,-  | 128.95         |
| 2         | BBN KB                         | 6.831.000.000,-  | 9.243.429.950,-  |                |
|           | Sanksi Administrasi            |                  | 17.800.875,-     |                |
|           | <b>Jumlah</b>                  | 6.831.000.000,-  | 9.261.230.825,-  | 135.58         |
| 3         | AIR BAWAH TANAH (ABT)          | -                | -                | -              |
| 4         | AIR PERMUKAAN (AP)             | -                | -                | -              |
|           | <b>Jumlah I</b>                | 11.759.000.000,- | 15.616.037.025,- | 132.8          |
| <b>II</b> | <b>RETRIBUSI DAERAH</b>        |                  |                  |                |
| 1         | PEMAKAIAN KEKAYAAN<br>DAERAH : |                  |                  |                |
|           | * DIPENDA :                    |                  |                  |                |
|           | > Sewa Rumah Dinas             | 1.148.600,-      | 1.241.400,-      |                |
|           | > Kantin                       | -                | -                |                |

|                                 |                         |                         |                 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| > Parkir                        |                         |                         |                 |
| * D P U :                       |                         |                         |                 |
| > Sewa tanah, jalan & bang      |                         | 13.073.125,-            |                 |
| > Sewa alat-alat berat          |                         | 980.000,-               |                 |
| 2 P D E                         |                         | 50.013.350,-            |                 |
| 3 KELEBIHAN MUATAN              |                         | 465.313.000,-           |                 |
| 4 RTPHH                         | 20.000.000,-            | 89.097.175,-            |                 |
| <b>Jumlah II</b>                | <b>21.148.600,-</b>     | <b>619.718.050,-</b>    | <b>2.930,30</b> |
| <b>III PENDAPATAN LAIN-LAIN</b> |                         |                         |                 |
| 1 SP.III                        | 122.030.000,-           | 156.410.000,-           |                 |
| 2 SP.III PERHUTANI              |                         | 1.078.350,-             |                 |
| 3 BUNGA DEPOSITO                |                         | 18.126.000,-            |                 |
| <b>Jumlah III</b>               | <b>122.030.000,-</b>    | <b>1.252.886.952,-</b>  | <b>1.026,70</b> |
| <b>BAGI HASIL PAJAK / BUKAN</b> |                         |                         |                 |
| <b>IV PAJAK</b>                 |                         |                         |                 |
| 1 PBB                           | 2.473.316.000,-         | 2.693.887.507,-         |                 |
| 2 HAK ATAS TANAH                | 45.000.000,-            | 8.106.000,-             |                 |
| 3 BPHTB                         | 74.321.000,-            | 76.872.569,-            |                 |
| <b>Jumlah IV</b>                | <b>2.592.547.000,-</b>  | <b>2.778.886.076,-</b>  | <b>107,79</b>   |
| <b>JUMLAH I s / d IV</b>        | <b>14.494.725.000,-</b> | <b>20.267.508.103,-</b> | <b>139,83</b>   |

Sumber : Dipenda Prop.Jateng UPPD Kab.Blora

Dari tabel 9 dan perhitungan persentase diatas maka dapat diketahui bahwa penerimaan terbesar dari PAD dalam tahun anggaran 2002 berasal dari pos Pajak daerah yang mencapai Rp. 15.616.037.025,- atau 132,80% dari target anggaran penerimaan PAD.

Selanjutnya untuk memahami mengenai perincian penerimaan yang berasal dari pajak daerah, dapat dilihat di tabel 10. berikut :

**Tabel 10**  
**Penerimaan Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 2002**

| No | Jenis Pungutan        | Target           | Realisasi        | Persen tase |
|----|-----------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1  | PAJAK DAERAH          |                  |                  |             |
|    | PKB                   | 4.928.000.000,-  | 6.283.679.300,-  |             |
|    | Sanksi Administrasi   |                  | 71.126.900,-     |             |
|    | Jumlah                | 4.928.000.000,-  | 6.354.806.200,-  | 128.95      |
| 2  | BBN KB                | 6.831.000.000,-  | 9.243.429.950,-  |             |
|    | Sanksi Administrasi   |                  | 17.800.875,-     |             |
|    | Jumlah                | 6.831.000.000,-  | 9.261.230.825,-  | 135.58      |
| 3  | AIR BAWAH TANAH (ABT) |                  |                  |             |
|    |                       |                  |                  |             |
|    |                       |                  |                  |             |
| 4  | AIR PERMUKAAN (AP)    |                  |                  |             |
|    | Jumlah                | 11.759.000.000,- | 15.616.037.025,- | 132,80      |

Masih dari tabel 9. diatas, terlihat bahwa dari sumber-sumber PAD nampak sumber penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah juga mengalami peningkatan, jumlah yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 21.148.600,- namun realisasinya adalah sebesar Rp. 619.718.050,- , sehingga dalam persentase peningkatannya adalah sebesar 2.930.30% atau secara terperinci, penerimaan yang bersumber dari retribusi daerah dapat diketahui dalam tabel 11. berikut

**Tabel 11**  
Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2002

| No | Jenis Pungutan   | Target                                    | Realisasi  | Persentase |
|----|--|---|--|------------|
| 1  | RETRIBUSI DAERAH :<br>PEMAKAIAN KEKAYAAN<br>DAERAH :<br>- DIPENDA :<br>> Sewa Rumah Dinas<br>> Kantin<br>> Parkir<br>- DPU :<br>> Sewa tanah, jalan & bang<br>> Sewa alat-alat berat | 1.148.600,-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 1.241.400,-<br>-<br>-<br>13.073.125,-<br>980.000,- |            |
| 2  | P D E  | -   | 50.013.350,-                                       |            |
| 3  | KELEBIHAN MUATAN   | -   | 465.313.000,-                                      |            |
| 4  | RTPHH  | 20.000.000                                | 89.097.175,-                                       |            |
|    | Jumlah   | 21.148.600,-                              | 619.718.050,-                                      | 2930,30    |

Sedangkan untuk pos pendapatan lain-lain juga mengalami peningkatan dari jumlah yang telah ditargetkan sebesar Rp. 122.030.000,- sedangkan realisasinya adalah Rp. 1.252.886.952,- sehingga ada peningkatan 1.026,70 %

#### **B.2.4. Faktor Penunjang dan Penghambat**

Kegiatan manajemen sebagai suatu proses dalam perjalanan organisasi senantiasa menjumpai berbagai faktor penunjang kelancaran, tetapi sekaligus juga menghadapi faktor-faktor penghambat yang muncul silih berganti. Dalam setiap proses manajemen, ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan) adalah merupakan lauk-pauk yang menggairahkan dalam perjalanan menuju sasaran, sehingga untuk dapat mencapai keberhasilan diperlukan keseriusan, kemampuan dan kematangan dalam bertindak.

Demikian pula dengan kegiatan manajemen pada UPPD Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugasnya pada tahun yang lalu dapat menikmati angin segar terhadap faktor-faktor penunjang keberhasilan, dan juga mengalami suasana tegang dalam menghadapi faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugasnya.

Kondisi faktor penunjang dan faktor penghambat tersebut secara sistematis telah dievaluasi serta diupayakan solusinya dalam kegiatan tugas kedinasan yang diuraikan sebagai berikut :

### **a. Faktor Penunjang**

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, kegiatan UPPD Kabupaten Blora pada tahun anggaran 2002 memang didukung oleh faktor-faktor penunjang yang meliputi :

#### **1. SDM yang mantap**

Dengan kekuatan personil UPPD Kabupaten Blora telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan bertahun-tahun secara rutin ini terus dipacu dan dikembangkan dengan manajemen partisipasi berupa pemberdayaan SDM dengan konsep produktif dan konstruktif. Sumber daya manusia yang merupakan potensi utama dalam pelaksanaan tugas ini rata-rata sudah memiliki masa kerja diatas 15 tahun, sehingga profesionalismenya di bidang pemungutan PAD telah cukup matang dan mantap dalam pelaksanaan tugas. Dengan penerapan konsepsi produktif dan konstruktif, SDM pada UPPD Kabupaten Blora dibina serta dikembangkan secara proporsional agar lebih berdaya guna dan berhasil guna secara optimal menuju keberhasilan pelaksanaan tugas.

#### **2. Landasan Tugas Yang Mendasar**

Pedoman pelaksanaan tugas yang dipedomani dengan Perda No. 1 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi UPPD pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi

Jawa Tengah senantiasa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan porsinya. Demikian pula dengan Perda-perda yang lain serta peraturan pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang terus-menerus disempurnakan sesuai dengan perkembangan adalah merupakan landasan hukum yang mendasar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang menghasilkan keberhasilan penerimaan PAD tahun tahun yang lalu dengan sukses.

### 3. Sarana dan Prasarana yang memadai

Meskipun sarana mobilitas berupa mobil dan sepeda motor yang tersedia dirasakan masih kurang, namun dengan segala kemampuan serta kebijakan dan partisipasi para karyawan yang dengan rela meminjamkan kendaraan pribadinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada tahun tahun yang lalu UPPD Kabupaten Blora telah berhasil melaksanakan visi dan misinya dengan baik.

### 4. Pembiayaan yang pas-pasan

Dengan pembiayaan yang pas – pasan, UPPD Kabupaten Blora tetap melaksanakan kegiatannya dengan optimal dengan memberdayakan partisipasi dari pihak-pihak terkait serta melakukan pengkhematan serta efisiensi yang ketat dalam pengeluaran pembiayaan kedinasan.



#### 5. Rentang Kendali yang proporsional

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasal Perda Prop. Jateng nomor 1 tahun 2002 telah dijabarkan pelaksanaan tugas teknis dan kebijakan, teknis Operasional Pelayanan Pendapatan Daerah yang diaplikasikan dengan perincian tugas semua pejabat struktural maupun fungsional dan staf sesuai mekanisme tugas dan koordinasi antar seksi terkait ( KISS) lebih sempurna dan perumusan masalah juga semakin komprehensif serta rentang kendali yang proporsional semakin dapat dievaluasi dan dikembangkan.

#### 6. Koordinasi Yang Simpatik

Mengingat landasan hukum terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 22 dan nomor 25 tahun 1999 belum tersedia dengan lengkap, maka untuk mensukseskan penerimaan PAD tahun anggaran mendatang UPPD Kabupaten Blora telah melaksanakan koordinasi secara simpatik. Koordinasi ini dilaksanakan melalui Instansi terkait untuk membantu UPPD Kabupaten Blora dalam memacu pemasukan pada tahun anggaran mendatang. Disamping itu juga mengadakan koordinasi dengan Pimpinan/Petugas Instansi Pemungutan PAD untuk saling menukar pemikiran guna mengatasi problematika dan berbagai kesulitan pemasukan PAD sekaligus mencari solusi.

Langkah-langkah ini ternyata mendapatkan tanggapan dan perhatian yang serius dari pihak terkait dan terbukti dapat meningkatkan realisasi penerimaan PAD dengan cukup signifikan.

#### 7. Situasi dan Kondisi yang menunjang

Krisis moneter yang berkepanjangan di negara kita semestinya berimbas pada daya beli masyarakat yang menurun bahkan dapat dikatakan merosot tajam yang pada gilirannya juga membawa akibat pembayaran pajak, Retribusi maupun penerimaan lain-lain menjadi menurun.

Dari situasi dan kondisi tersebut apabila dilihat pada fakta dan data lapangan menunjukan bukti yang berbeda. Bahkan target PAD yang ditargetkan naik dibanding penerimaan tahun sebelumnya ternyata dapat direalisasikan dengan baik dan bahkan melampauinya. Salah satu rekkening penerimaan PAD yang menonjol adalah penerimaan dari PKB, BBNKB, dan SP.3. Hal ini bisa terjadi diakibatkan karena masuknya kendaraan bermotor dari Non Jepang yang bisa dijual di Indonesia dengan harga murah (harga  $\pm 50\%$  dari harga jual kendaraan dari Jepang). Hal semacam ini tentunya perlu disyukuri sebagai kondisi yang menunjang dalam peningkatan penerimaan PAD.

## **b. Faktor Penghambat**

Meskipun kondisi secara makro dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah ( UPPD ) Kabupaten Blora telah dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses, namun apabila dikaji secara mendalam sesungguhnya masih terdapat kemungkinan-kemungkinan optimalisasi potensi yang ada dengan pemberdayaan yang lebih serius serta mengeliminasi dan meminimalisasi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) secara terpadu terhadap faktor-faktor penghambat kelancaraan pelaksanaan tugas.

Beberapa faktor penghambat yang merupakan faktor riil yang sudah diinventarisasi dan perlu diupayakan solusinya dengan serius meliputi :

### **1. Staf Seksi yang belum terisi petugas**

Staf pada Seksi Penagihan dan Pelaporan yang beberapa waktu lalu ditinggalkan oleh petugasnya dan dalam tahun anggaran ini masih kosong karena yang bersangkutan dialihtugaskan pada unit kerja lain merupakan salah satu faktor penghambat dalam mekanisme kerja di UPPD Kabupaten Blora. Meskipun dalam kenyataan sehari-hari fungsi dan tugas Seksi Penagihan dan pelaporan dapat berjalan secara rutin, namun hasil produksinya dirasa kurang optimal bila dibandingkan dengan seksi lain yang tidak kosong / lengkap.

## 2. Kondisi Kantor Samsat

Tidak semestinya Kantor Bersama Samsat terlihat kotor dan kumuh, lebih-lebih kamar mandinya yang kurang terawat dan banyaknya lampu yang padam. Sebagai tempat pelayanan umum yang senantiasa dikunjungi banyak orang setiap harinya, tempat ini seharusnya selalu bersih, rapi dan menyenangkan.

Kondisi yang sedemikian tersebut telah diamati serta dievaluasi lebih mendalam ternyata diakibatkan oleh DUALISME PENGURUSAN. Pengurusan yang tidak satu komando pada Kantor Samsat berakibat saling lemar tanggung jawab sehingga mengakibatkan permasalahannya tetap terbengkalai dan tidak jelas yang harus menanganinya.

Terhadap situasi seperti ini diharapkan landasan kerja yang konkrit terhadap pengelolaan gedung Samsat ini, khususnya dalam mengkoordinasikan Tenaga *Cleaning Service*, anggaran lampu-lampu dan pembelian oli mesin disel maupun pemeliharaan gedungnya.

## 3. Kurangnya Perangkat Komputer

Komputer sebagai pelengkap peralatan kantor pada saat ini sangat dirasakan keberadaannya bagi UPPD Kabupaten Blora, jumlah komputer yang hanya 3 buah ini sering mengalami gangguan dan kurang mampu menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan komputer milik sendiri terpaksa

dikerjakan komputer lain dengan membayar biaya rental atau jasa pengetikan.

Mengingat peralatan komputer di UPPD Kabupaten Blora bila dibandingkan dengan volume pekerjaan sudah tidak seimbang, dan agar tidak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas, maka diperlukan penambahan peralatan komputer baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

#### 4. Kesulitan One Line Komputer

Mengingat nomor telepon di UPPD Kabupaten Blora sampai dengan akhir tahun anggaran ini hanya terdapat satu nomor saja, maka agar tidak mengganggu kegiatan one line komputer diperlukan tambahan nomor telepon lagi.

#### 5. Kekurangan Tenaga Satpam

Petugas Satpam yang bertugas pada UPPD Kabupaten Blora pada saat ini hanya berjumlah enam masing – masing untuk UPPD / samsat Blora dan Kantor samsat pembantu Cepu tiga orang orang, padahal menurut lokasi Kantor serta volume tugas yang harus dilaksanakan dibutuhkan formasi delapan orang sehingga kurang dua orang.

## 6. Mobilitas yang kurang

Volume dan tugas UPPD Kabupaten Blora semakin lama semakin meningkat membutuhkan sarana operasional yang semakin memadai. Dengan mobilitas yang tersedia berupa 1 ( satu) mobil dan 8 ( delapan) sepeda motor pada tahun – tahun terakhir ini terasa banyak kendala, terbukti beberapa kali terjadi fakta bahwa untuk melaksanakan kegiatan operasional terpaksa dimintakan kerelaan dari para karyawan untuk memberikan pinjaman kendaraan pribadinya. Sesuai dengan kemampuan anggaran serta urgensi kebutuhannya diharapkan tambahan mobilitas bagi UPPD Kabupaten Blora minimal 1 ( satu) mobil lagi dan 2 ( dua) sepeda motor untuk kegiatan operasional dan koordinasi.

## 7. Pembiayaan SUPER KPKB

Dengan meningkatnya tarif pos untuk berbagai pengiriman surat, ternyata berdampak pula pada pelayanan SUPER KPKB bagi wajib Pajak. Sebelum terjadinya kenaikan tarif Pengiriman lewat PT. Pos Indonesia, anggaran pengiriman SUPER KPKB dapat menjangkau wajib pajak dalam jumlah yang banyak, namun dengan kenaikan tarif pos yang cukup tinggi, pengiriman SUPER KPKB dengan dana yang tersedia hanya menjangkau sasaran  $\pm 40 \%$  nya.

### **B. 2.5. Solusi yang Dilakukan**

Berbagai faktor riil yang merupakan faktor penunjang dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pada UPPD Kabupaten Blora apabila dipadukan, diolah dan diberikan suntikan fasilitas secara tepat ternyata merupakan potensi strategis yang dapat diberdayakan sedemikian rupa serta diarahkan secara optimal untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan operasional.

Dari kenyataan yang terjadi pada kondisi riil UPPD Kabupaten Blora, pada tahun – tahun terakhir telah diupayakan berbagai solusi terhadap berbagai problematika yang terjadi, diantaranya terhadap beberapa hal sebagai berikut :

#### **1. Pemberdayaan SDM**

SDM yang sudah profesional pada UPPD Kabupaten Blora dalam tahun anggaran 2003 lebih diporsikan lagi tugas dan kewajibannya agar lebih bergairah dan semakin tepat guna dengan menyelenggarakan mutasi intern secara berkesinambungan.

#### **2. Pengolahan Data Realisasi PAD**

Sebagaimana dilaksanakan di Kantor Pusat Dipenda Prop. Jateng, UPPD Kabupaten Blora juga telah dapat melaksanakan one line komputer terhadap UPPD lain sehingga data-data Realisasi PAD dapat diolah lebih cepat dan lebih akurat.

### 3. Pengembangan Ide dan Kreatifitas

Dalam rangka meningkatkan manajemen dan partisipasi pelaksanaan tugas UPPD Kabupaten Blora , telah dipersilahkan kepada semua karyawan dari segala lapisan untuk menyampaikan usul dan saran melalui unit kerjanya masing-masing sebagai masukan untuk diolah lebih lanjut. Kegiatan ini dapat disampaikan setiap saat untuk kemudian diolah, dikoordinasikan serta dirumuskan dan diolah dalam forum pertemuan bulanan yang dihadiri para Ka Si, Ka Sub bag, Sek Koord, Bendaharawan dan ka UPPD.

### 4. Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Melihat potensi yang dimilikinya, UPPD Kabupaten Blora berpeluang mengolah, mengembangkan dan memberdayakannya dengan lebih produktif. Berkenaan dengan peluang tersebut sedang dipersiapkan pembentukan Koperasi yang diharapkan dapat mengelola potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

= Berbagai macam kegiatan kedinasan yang dilaksanakan pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya pada dasarnya difokuskan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas kedinasan.

Termasuk diantaranya Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dan tugas monitoring ke Daerah-daerah serta Rapat intern adalah serangkaian kegiatan yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas UPPD Kabupaten



Blora . Namun demikian juga tidak kalah pentingnya adalah kegiatan non formal yang dilaksanakan oleh UPPD Kabupaten Blora secara rutin maupun secara temporair dan insidentil. Kegiatan non formal tersebut yang dilaksanakan di luar tugas kedinasan sebenarnya juga diarahkan serta diwarnai untuk kepentingan kedinasan juga. Kegiatan Non Formal ini secara tidak langsung juga menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas, sebab diwarnai dengan motivasi serta pesan sponsor yang membawa sikap mental serta pola pikir positif dalam menggalang pemahaman, dukungan serta solidaritas karyawan yang pada muaranya akan berdampak pada peningkatan gairah kerja, suasana harmonis serta keserasian pelaksanaan tugas.

Kegiatan lain-lain yang dilaksanakan secara rutin dan temporair serta insidentil di UPPD Kabupaten Blora , diantaranya berupa :

1. Arisan Karyawati dan Istri Karyawan

Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan yang bertempat di UPPD dengan pengisian acara keterampilan dan ceramah terhadap sesuatu hal yang menarik.

2. Senam yang Bervariasi

Sebagaimana dilaksanakan pada Instansi yang lain, UPPD Kabupaten Blora setiap hari Jumat juga menyelenggarakan senam Kesegaran Jasmani. Guna menggairahkan suasana senam tersebut yang diharapkan akan mencapai kondisi MENSANA INKORPORESANO yaitu dalam tubuh yang sehat

terdapat pikiran yang sehat pula, maka pelaksanaan senam pada UPPD Kabupaten BLora dilaksanakan dengan bervariasi. Dengan mendatangkan instruktur secara khusus, setiap Jumat tidak hanya dilaksanakan senam kesegaran jasmani yang rutin, tetapi juga sengaja diajarkan senam khusus seperti senam aerobik, senam kesehatan maupun senam lain yang menarik dan menyenangkan yang mendorong karyawan untuk mengikuti senam dengan minat yang besar.

### 3. Santapan Rohani

Guna memberikan rambu-rambu sekaligus juga santapan dan siraman rohani dalam pelaksanaan tugas, secara rutin dan insidentil dilaksanakan ceramah agama Islam sekaligus dengan tanya jawab dengan materi yang dipandu sesuai dengan kepentingan UPPD dan disampaikan oleh pembicara yang selektif.

Kegiatan ini disamping sebagai pembinaan rohani secara intern juga diharapkan membawa dampak positif terhadap moralitas individu para karyawan yang pada gilirannya akan menjadi pengendali pribadi dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

### 4. Olagraha Persahabatan

UPPD Kabupaten Blora berpotensi memiliki atlit-atlit olahraga khususnya tenis lapangan, tenis meja, bulutangkis serta catur. Potensi ini telah diolah

sebagai duta olah raga yang bisa melakukan pertandingan persahabatan sebagai saran loby, koordinasi serta membina komunikasi dalam suasana santai yang berdampak memperlancar hubungan kerja dengan Instansi terkait.

## **C. Analisis Hasil Penelitian**

### **C.1. Kontribusi Upaya Pajak ( *Tax Effort* ) PKB dan BBNKB dalam Peningkatan PAD**

Upaya pajak ( *tax effort* ) yang merupakan prosentase perbandingan antara kemampuan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) dengan perkembangan PDRB riil pada UPPD Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel 12.berikut

**Tabel 12****Upaya Pajak ( Tax Effort) Pajak Kendaraan Bermotor****UPPD Kabupaten Blora Tahun 1997 - 2001**

| No | Tahun       | Penerimaan PKB | PDRB ( juta ) | Tax Effort ( %) |
|----|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3              | 4             | 5               |
| 1  | 1997        | 1.831.697.325  | 703.277,83    | 0,261           |
| 2  | 1998        | 1.989.498.775  | 723.543,19    | 0,275           |
| 3  | 1999        | 2.366.645.650  | 683.905,22    | 0,345           |
| 4  | 2000        | 2.445.399.750  | 693.069,36    | 0,353           |
| 5  | 2001        | 4.785.574.575  | 710.703,43    | 0,673           |
|    | Rata – rata |                |               | 0,3816          |

Sumber : Data realisasi penerimaan UPPD Kabupaten Blora, 1997 – 2001

(diolah)

= Dari hasil perhitungan perbandingan antara penerimaan PKB dengan PDRB kabupaten Blora berdasarkan atas harga konstan selama 5 tahun ( 1997 – 2001 ) yang merupakan tingkat upaya pajak ( *tax effort* ) seperti tersebut di atas, terlihat bahwa upaya pajak PKB pada UPPD Kabupaten Blora dapat dikatakan sangat rendah, namun dari tahu ke tahun mengalami peningkatan hingga

mencapai tingkat rata-rata sebesar 0,3816 %. Hal ini sudah barang tentu akan mempengaruhi tingkat penerimaan Propinsi Jawa Tengah yang berasal dari sektor pajak daerah . Kondisi ini telah menunjukkan pula bahwa tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Blora mengalami peningkatan yang cukup berarti bagi peningkatan upaya pajak daerah terutama dari jenis Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) , sedangkan untuk mengetahui besarnya upaya pajak pada Bea balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) di UPPD Kabupaten Blora sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini

**Tabel 13**

**Upaya Pajak ( Tax Effort) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

**UPPD Kabupaten Blora Tahun 1997 – 2001**

| No | Tahun       | Penerimaan<br>BBNKB | PDRB ( juta ) | Tax Effort ( %) |
|----|-------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3                   | 4             | 5               |
| 1  | 1997        | 2.362.851.975       | 703.277,83    | 0,336           |
| 2  | 1998        | 1.308.133.475       | 723.543,19    | 0,180           |
| 3  | 1999        | 1.543.449.525       | 683.905,22    | 0,226           |
| 4  | 2000        | 2.697.258.000       | 693.069,36    | 0,389           |
| 5  | 2001        | 6.610.186.400       | 710.703,43    | 0,930           |
|    | Rata – rata |                     |               | 0,412           |

Sumber : Data realisasi penerimaan UPPD Kabupaten Blora, 1997 – 2001 (

diolah)

Dari hasil perhitungan tersebut di atas terlihat bahwa upaya pajak ( tax effort ) dari penerimaan BBNKB 5 tahun ( 1997 – 2001 ) pada UPPD Kabupaten Blora dapat dikatakan sangat rendah , namun tiap tahun mengalami rata- rata peningkatan yang cukup tinggi yaitu dengan tingkat rata – rata upaya pajak mencapai sebesar 0,412 %. Hal ini sudah barang tentu akan mempengaruhi tingkat penerimaan Propinsi Jawa Tengah yang berasal dari sektor pajak daerah . Kondisi ini telah menunjukkan pula bahwa tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Blora mengalami peningkatan yang cukup berarti bagi peningkatan upaya pajak daerah terutama dari jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) .

Hasil wawancara peneliti dengan informan berkaitan dengan penurunan perkembangan ekonomi daerah di kabupaten Blora pada akhir – akhir ini dapat dijelaskan bahwa dalam menghadapi situasi yang demikian ini pemerintah Kabupaten Blora tidak dapat lagi menunggu sampai dinamika pertumbuhan ekonomi mencapai wilayahnya, karena hal tersebut tidak mungkin terjadi.. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Blora harus bertindak secara proaktif untuk meraih dan menarik investor – investor swasta domestik maupun asing ke wilayahnya dengan cara menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha. Dalam hal ini memerlukan adanya peran pemerintah untuk memunculkan peranan

sebagai pendorong bagi perkembangan perekonomian di wilayahnya. Dalam pendekatan ini diharapkan tugas pemerintah tidak lagi menyelenggarakan pelayanan atau kegiatan secara langsung, namun melakukan pengaturan, memberikan insentif dan melakukan pengawasan agar pihak – pihak yang dikehendaki dapat melaksanakan kegiatan atau pelayanan yang dimaksud.

Hasil wawancara dengan informan lain disebutkan bahwa keberhasilan memperoleh tingkat upaya pajak yang tinggi baik dari PKB maupun BBNKB akan terkait erat dengan kehandalan UPPD itu sendiri. Artinya hanya apabila aparatur UPPD di masing – masing daerah memiliki kemampuan atau pengetahuan yang luas atau tinggi dalam perumusan kebijakan strategis pelayanan pendapatan, di samping pimpinan unit mampu berkiprah secara efisien dan efektif dalam setiap kegiatan pelayanannya . Kondisi semacam ini secara tidak langsung dapat memotivasi stakeholder untuk mentaati semua kewajiban dalam membayar atau melunasi PKB dan BBNKB. Selain itu perlu adanya pembenahan organisasi UPPD dalam upaya pengembangan kapabilitas organisasi dalam menanggapi perubahan – perubahan dinamis yang terjadi pada lingkungannya, melalui pembelajaran organisasi , penciptaan pengetahuan dan keterpaduan antara budaya dan strategi.

Dari hasil beberapa wawancara tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat upaya pajak PKB dan BBNKB dapat terangkat seiring dengan peningkatan perkembangan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pula pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah.

## C.2. Kontribusi Hasil Guna ( Efektifitas ) PKB dan BBNKB Pada Peningkatan PAD

Besarnya hasil guna ( efektifitas ) PKB dan BBNKB pada UPPD Kabupaten Blora selama 5 tahun ( 1997 – 2001 ) yang merupakan prosentase perbandingan antara penerimaan pajak dengan potensi pajak dapat dilihat pada tabel 14. berikut ini

**Tabel 14**

Hasil Guna ( Efektivitas) Pajak Kendaraan Bermotor

UPPD Kabupaten Blora Tahun 1997 – 2001

| No | Tahun       | Penerimaan PKB | Potensi PKB ( juta ) | Efektifitas ( %) |
|----|-------------|----------------|----------------------|------------------|
| 1  | 2           | 3              | 4                    | 5                |
| 1  | 1997        | 1.831.697.325  | 1.727.000.000        | 106              |
| 2  | 1998        | 1.989.498.775  | 2.081.000.000        | 100              |
| 3  | 1999        | 2.366.645.650  | 2.437.562.000        | 97               |
| 4  | 2000        | 2.445.399.750  | 2.134.000.000        | 114              |
| 5  | 2001        | 4.785.574.575  | 4.105.000.000        | 117              |
|    | Rata – rata |                |                      | 106,8            |

Sumber : Data realisasi penerimaan UPPD Kabupaten Blora, 1997 – 2001 (

diolah)



Dari hasil perhitungan perbandingan antara penerimaan PKB dengan potensi PKB Kabupaten Blora berdasarkan atas harga konstan selama 5 tahun ( 1997 – 2001 ) seperti tersebut di atas, terlihat bahwa tingkat efektivitas pajak PKB pada UPPD Kabupaten Blora dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu dengan tingkat rata – rata upaya pajak mencapai sebesar 106,8 %. Kondisi ini telah menunjukkan pula bahwa tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Blora mengalami peningkatan yang cukup berarti bagi peningkatan efektifitas daerah terutama dari jenis Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) .

Sedangkan untuk mengetahui besarnya efektifitas pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB ) pada UPPD kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 15**

Hasil Guna ( Efektivitas) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
UPPD Kabupaten Blora Tahun 1997 – 2001

| No | Tahun       | Penerimaan<br>BBNKB | Potensi BBNKB | Efektivitas ( %) |
|----|-------------|---------------------|---------------|------------------|
| 1  | 2           | 3                   | 4             | 5                |
| 1  | 1997        | 2.362.851.975       | 2.331.812.425 | 101,3            |
| 2  | 1998        | 1.308.133.475       | 1.098.529.000 | 119,1            |
| 3  | 1999        | 1.543.449.525       | 1.650.440.000 | 93,5             |
| 4  | 2000        | 2.697.258.000       | 1.351.000.000 | 199,7            |
| 5  | 2001        | 6.610.186.400       | 5.621.000.000 | 117,6            |
|    | Rata – rata |                     |               | 126,24           |

Sumber: Data realisasi penerimaan UPPD Kabupaten Blora, 1997 – 2001

(diolah)

Dari hasil perhitungan perbandingan antara penerimaan BBNKB dengan potensi BBNKB Kabupaten Blora berdasarkan atas harga konstan selama 5 tahun ( 1997 – 2001 ) seperti tersebut di atas, terlihat bahwa tingkat efektivitas pajak BBNKB pada UPPD Kabupaten Blora dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu dengan tingkat rata – rata upaya pajak mencapai sebesar 126,24 %. Kondisi ini telah menunjukkan pula bahwa tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Blora mengalami peningkatan yang cukup berarti bagi peningkatan efektivitas pajak daerah terutama dari jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ).

Hasil wawancara peneliti dengan responden berkaitan dengan efektivitas pajak ( hasil Guna) di Kabupaten Blora dapat dijelaskan bahwa baik jenis PKB maupun BBNKB selalu berkaitan dengan kemampuan aparatur UPPD dalam merumuskan rencana tindakan peningkatan pendapatan dengan mempertimbangkan aspek – aspek pelaksanaan praktis dan persyaratan yang memungkinkan pelaksanaannya. Dalam upaya peningkatan efektivitas pajak tersebut perlu adanya prosedur pajak yang menyulitkan wajib pajak untuk menyembunyikan hutang pajaknya, disamping cara pemungutan pajak yang harus mudah untuk dilaksanakan dan sistem catatan yang baik untuk dapat segera mengetahui kelalaian pajak.

Selain itu, hasil wawancara lain menjelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pajak dapat dilakukan dengan memotong jalur penghindaran pajak oleh wajib pajak, mengurangi kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak,

menghindari penipuan oleh petugas pajak itu sendiri. Apabila hal tersebut terjadi maka efektivitas pajak yang diharapkan tidak akan terwujud bahkan mengakibatkan terganggunya aktivitas organisasi dan manajemen UPPD secara keseluruhan.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pajak ( PKB dan BBNKB) dapat ditingkatkan melalui upaya pengelolaan manajemen operasional pajak secara baik untuk mengurangi tingkat kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak dan penipuan yang dilakukan oleh petugas pajak itu sendiri.

### **C.3. Kontribusi Daya Guna ( Efisiensi ) PKB dan BBNKB Pada Peningkatan PAD**

Hasil perhitungan daya guna ( efisiensi) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB) yang merupakan perbandingan antara biaya pemungutan pajak dengan potensi pajak selama 5 tahun ( 1997 – 2001) pada UPPD Kabupaten Bloradapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 16**

Daya Guna ( efisiensi) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPPD Kabupaten  
Blora Tahun ( 1997 – 2001)

| No | Tahun       | Biaya Pemungutan<br>PKB | Penerimaan PKB | Efisiensi (%) |
|----|-------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1  | 2           | 3                       | 4              | 5             |
| 1  | 1997        | 1.530.675               | 1.831.697.325  | 0,08          |
| 2  | 1998        | 1.565.475               | 1.989.498.775  | 0,08          |
| 3  | 1999        | 1.998.365               | 2.366.645.650  | 0,08          |
| 4  | 2000        | 2.258.000               | 2.445.399.750  | 0,09          |
| 5  | 2001        | 4.538.000               | 4.785.574.575  | 0,09          |
|    | Rata – rata |                         |                | 0,084         |

Sumber : Data realisasi penerimaan UPPD Kabupaten Blora 1997 – 2001

(diolah)

Dari hasil perhitungan perbandingan antara biaya pemungutan PKB dengan penerimaan PKB yang dipungut selama 5 tahun ( 1997 – 2001) seperti tersebut diatas terlihat bahwa tingkat efisiensi pajak PKB pada UPPD Kabupaten Blora dapat dikatakan sangat rendah namun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan , yaitu dengan tingkat efisiensi rata – rata sebesar 0,084 %. Sedangkan untuk mengetahui besarnya daya guna

(efisiensi) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPPD Kabupaten Blora sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 17**

Daya Guna ( efisiensi) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
UPPD Kabupaten Blora Tahun 1997 – 2001

| No | Tahun       | Biaya Pemungutan<br>BBNKB | Penerimaan<br>BBNKB | Efisiensi<br>% |
|----|-------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| 1  |             |                           | -                   |                |
| 1  | 1997        | 2.135.000                 | 2362851975          | 0.092          |
| 2  | 1998        | 1.207.575                 | 1308133475          | 0.091          |
| 3  | 1999        | 1.357.000                 | 1543449525          | 0.091          |
| 4  | 2000        | 2.478.560                 | 2697258000          | 0.093          |
| 5  | 2001        | 6.175.180                 | 6610186400          | 0.096          |
|    | Rata – rata |                           |                     | 0.093          |

Sumber : Data realisasi penerimaan UPPD Kabupaten Blora 1997 – 2001

(diolah)

Dari hasil perhitungan perbandingan antara biaya pemungutan BBNKB dengan penerimaan BBNKB Kabupaten Blora berdasarkan atas harga konstan selama 5 tahun ( 1997 – 2001 ) seperti tersebut di atas, terlihat bahwa tingkat efektivitas pajak BBNKB pada UPPD Kabupaten Blora dapat dikatakan sangat rendah namun dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan rata – rata yang tinggi, yaitu dengan tingkat rata – rata upaya pajak mencapai sebesar 0,093 %.

Kondisi ini telah menunjukkan pula bahwa tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Blora mengalami peningkatan yang cukup berarti bagi peningkatan efisiensi pajak daerah terutama dari jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Hasil wawancara peneliti dengan responden berkaitan dengan efisiensi pajak (Daya Guna) di Kabupaten Blora dapat dijelaskan bahwa baik jenis PKB maupun BBNKB selalu berkaitan dengan kemampuan aparat UPPD dalam merumuskan rencana tindakan peningkatan pendapatan dengan mempertimbangkan aspek – aspek pelaksanaan praktis dan persyaratan yang memungkinkan pelaksanaannya. Dalam upaya peningkatan efisiensi pajak tersebut perlu adanya prosedur pajak yang menyulitkan wajib pajak untuk menyembunyikan hutang pajaknya, disamping cara pemungutan pajak yang harus mudah untuk dilaksanakan dan sistem catatan yang baik untuk dapat segera mengetahui kelalaian pajak.

Dari hasil wawancara lain menjelaskan bahwa untuk meningkatkan efisiensi pajak dapat dilakukan dengan memotong jalur penghindaran pajak oleh wajib pajak, mengurangi kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, menghindari penipuan oleh petugas pajak itu sendiri. Apabila hal tersebut terjadi maka efektivitas pajak yang diharapkan tidak akan terwujud bahkan mengakibatkan terganggunya aktivitas organisasi dan manajemen UPPD secara keseluruhan. Dengan peningkatan kinerja dari para anggota diharapkan

dapat membawa suatu keuntungan bagi UPPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

Dari beberapa hasil wawancara tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tingkat efisiensi pajak ( PKB dan BBNKB) dapat ditingkatkan melalui upaya pengelolaan manajemen operasional pajak secara baik untuk mengurangi tingkat kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak dan penipuan yang dilakukan oleh petugas pajak itu sendiri.

#### **C. 4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah**

Dalam mengatasi permasalahan yang timbul dan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dan Pembangunan Daerah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sebagai berikut :

- a. Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas baik intern maupun ekstern yang berdampak langsung terhadap penerimaan daerah;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan lebih mengintensifkan penyuluhan yang langsung pada sasaran, bekerjasama dengan insransi terkait di masing-masing Daerah Kabupaten / Kota;

- c. Guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus diupayakan peningkatan sarana/prasarana kerja yang meliputi pembangunan Gedung Kantor bersama Samsat Pembantu yang dipandang perlu, khususnya para wajib pajak yang berdomisili dengan perbatasan wilayah Jateng
- d. Penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan pada Kantor Bersama Samsat dengan :
  - Membuka pabrik plat Nomor Kendaraan Bermotor dilingkungan Kantor Bersama Samsat.
  - Pelayanan pemberian fiscal antar daerah dan fiscal pajak daerah di Kantor Bersama Samsat.
  - Persiapan sistim pembayaran PKB dan BBNKB dengan pola online dan pembukaan Kantor Samsat Pembantu.
- e. Persiapan pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Perda PKB / BBNKB, Perda ABT, AP dan PBBKB;
- f. Melakukan kajian terhadap bentuk-bentuk pelaporan dan pembukuan PAD Propinsi sesuai dengan Kep Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 105 tahun 2002 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) dengan melakukan pembinaan teknis kepada aparat pemungut pendapatan



daerah yang tercermin dalam peningkatan pelayanan, disiplin kerja, kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi;

- h. Meningkatkan pembinaan secara terpadu dengan instansi terkait khususnya aparat pengelola pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- i. Untuk mewujudkan sistim informasi manajemen yang diharapkan (data akurat, cepat dan tepat), diupayakan peningkatan dibidang komputerisasi dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pembayar pajak dan retribusi serta percepatan pengiriman data PAD dari masing-masing UPPD se Jawa Tengah.
- j. Bekerja sama dengan Biro Hukum dan Pemerintahan Kabupaten/Kota mengadakan penyuluhan sosialisasi Peraturan Daerah yang baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Guna meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat dalam tahun anggaran yang akan datang, bila situasi dan kondisi keuangan memungkinkan direncanakan akan dilaksanakan pengadaan tanah untuk perluasan kantor di UPPD Kab. Blora dan peningkatan / renovasi berupa rumah dinas untuk pimpinan, diantaranya kantor UPPD Kab. Blora. Sedangkan pada tahun ini dilaksanakan proyek peningkatan / penyempurnaan Kantor UPPD dan Samsat Blora.

SOT dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah tercermin pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi yang telah diundangkan pada tanggal 21 Juni 2001 sedangkan SOT untuk UPPD tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Poko, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis.

Untuk UPPD Dipenda Jawa Tengah mengalami pengembangan yang semula bernama Caang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah sejumlah 35 Cabang Dinas, dengan adanya SOT baru menjadi UPPD ( Unit Pelayanan Pendapatan Daerah ) dengan jumlah sebanyak 37 UPPD.

Agar dicapai sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai dedikasi yang tinggi, jujur serta bertanggung jawab khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ditempuh upaya :

- a. Mengikutsertakan pegawai yang masih berbasis SLTA sebanyak kurang lebih 150 orang untuk mengikuti pendidikan tingkat D3, bekerja sama dengan Lembaga pendidikan Akademi Keuangan dan Akuntansi Semarang;
- b. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen pendapatan daerah yang bekerja sama dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah;

- c. Mengirimkan ke lembaga -lembaga pendidikan dan pelatihan baik pendidikan penjenjangan (structural) maupun pendidikan teknis fungsional guna meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan profesionalisme;
- d. Pelatihan operator komputer ke Samsatan dan PAD secara periodik.

Usaha lain yang dilakukan guna peningkatan pelayanan pada UPPD kabupaten Blora pada umumnya, dilakukan langkah pengembangan Sistem Informasi manajemen. Kegiatan tersebut , antara lain ;

- a. Dalam Tahun mendatang direncanakan pengembangan sistem informasi manajemen dengan menyempurnakan sarana perangkat komputer Samsat di 28 Kota/Kabupaten serta penyempurnaan jaringan informasi PAD;
- b. Penyempurnaan dan penambahan perangkat komputer online pelayanan antar wilayah;
- c. Program Peningkatan kualitas SDM khususnya para operator, supervisi dan programmer dengan pembinaan lewat pelatihan/pendidikan ketrampilan yang berkesinambungan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 bahwa paradigma baru berkaitan dengan belanja sudah beralih yang semula belanja Rutine dan Pembangunan sekarang menjadi Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik, adapun rinciannya tersebut dibawah ini :

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Aparatur Daerah sebesar   | Rp. 93.453.102.000,-  |
| Terdiri atas :                       |                       |
| o Belanja Administrasi Umum          | Rp. 27.331.074.000,-  |
| o Belanja Operasi dan Pemeliharaan   | Rp. 63.600.458.000,-  |
| o Belanja Modal                      | Rp. 2.521.570.000,-   |
| b. Belanja Pelayanan Publik          | Rp. 35.974.441.000,-  |
| o Belanja Administrasi Umum          | Rp. 13.972.583.000,-  |
| o Belanja Operasi dan Pemeliharaan   | Rp. 9.442.748.000,-   |
| o Belanja Modal                      | Rp. 12.559.110.000,-  |
| o Belanja Bg. Hasil dan Bantuan Keu. | Rp. —                 |
| o Belanja Tidak Tersangka            | Rp. —                 |
| Jumlah Keseluruhan                   | Rp. 129.427.543.000,- |

Berdasarkan Peraturan daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.171.298.064.000,- ( Satu Trilyun Seratus Tujuh Puluh Satu Milyard Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Pajak Kendaraan Bermotor          | Rp. 340.000.000.000,- |
| b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | Rp. 465.000.000.000,- |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| c. Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor      | Rp. 188.655.500.000,- |
| d. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah     | Rp. 6.000.000.000,-   |
| e. Pajak Pemanfaatan Air Permukaan       | Rp. 4.000.000.000,-   |
| 2. Retribusi Daerah                      |                       |
| a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Dh.      | Rp. 62.000.000,-      |
| b. Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Ht. | Rp. 3.500.000.000,-   |
| c. Semarang Mineral Pembangunan          | Rp. 82.000.000,-      |
| 3. Lain-lain Pendapatan                  |                       |
| a. Sumbangan Pihak Ketiga                | Rp. 8.500.000.000,-   |
| 4. Bagi Hasil Pajak                      |                       |
| a. Pajak Bumi dan Bangunan               | Rp. 68.000.000.000,-  |
| b. Bea Perolehan hak Atas Tanah & Bg.    | Rp. 12.500.000.000,-  |
| c. Pajak Penghasilan Pasal 21            | Rp. 72.500.000.000,-  |
| 5. Bagi Hasil Bukan Pajak                |                       |
| a. Pemberian HAT Pemerintah              | Rp. 2.500.000.000,-   |

= Dari jumlah rencana penerimaan tersebut dirinci untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah berupa Anggaran Kas dan Pendapatan . Secara fungsional UPPD Kabupaten Blora mempunyai tugas memungut beberapa pendapatan asli daerah, yang meliputi :

1. Pajak daerah, yang terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB) berdasarkan Perda Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2002
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB) berdasarkan Perda Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2002
  - c. Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah (PPABT) berdasarkan Perda Propinsi Jateng No. 7 Tahun 2002
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPPAP) berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2002
2. Retribusi Daerah, Yang terdiri dari :
- Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan berdasarkan Perda Propinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 1994
  - Retribusi tentang Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Perda Propinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2001
3. Pendapatan Lain – lain :
- a. Sumbangan Pihak ke 3 ( Dealer) berdasarkan Perda Propinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 1984
  - b. Sumbangan pihak ke 3 ( Perhutani) berdasarkan Perda Propinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 1984 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 977 / 426/2002 tanggal 5 juli 2002

Dari data penelitian diatas bahwa UPPD Kabupaten Blora dalam memungut pendapatan asli daerah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari kriteria yang dikemukakan oleh Devas ( 1989) tersebut diatas.

Tuntutan masyarakat terhadap reformasi khususnya birokrasi agar aparatur pemerintah semakin akuntabel dan efisien, sehingga dapat meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, hal tersebut harus diwujudkan dalam suatu sistem dimana anggaran pendapatan diharapkan terus dapat meningkatkan tanpa banyak membebani masyarakat disertai anggaran belanja yang lebih berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara langsung dengan prinsip efisien, tepat sasaran serta tepat manfaat.

Gejala dimaksud membawa konsekuensi bagi Dipenda sebagai unsur pelaksana Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dibidang Pendapatan Daerah, untuk menyerap semua aspirasi yang berkembang secara bijak dan penuh optimisme, dengan mengaplikasikan program peningkatan PAD secara gradual disertai pemberdayaan segenap potensi yang ada serta didukung Program Anggaran Belanja yang proporsional dan terus diupayakan peningkatannya pada sektor pelayanan publik.

Kelesuan pasar kendaraan bermotor yang diperkirakan sebagai dampak dari perekonomian dalam negeri yang berfluktuasi dan pengaruh AFTA 2003 yang cukup kental, merupakan fenomena yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian rencana Anggaran Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah

tahun ini, yang pada hakekatnya 70 % didukung dari Pajak Daerah (PKB/BBNKB).

Dengan demikian UPPD sebagai ujung tombak Dinas dilapangan, dituntut untuk terus komit terhadap Visi dan Misi Dipenda, dengan mencermati dan mengantisipasi setiap peluang dan tantangan untuk tercapainya sasaran yang telah ditentukan Dinas.

Dalam rangka untuk mengetahui sekaligus mengantisipasi kondisi yang diinginkan dapat teraktualisasi di bidang Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang pemenuhan dan peningkatannya tertumpu pada kinerja UPPD sebagai ujung tombak operasional Dinas, dapat dicermati dari seberapa jauh rencana anggaran ( Target ) dapat direalisasikan serta seberapa besar peningkatan kinerja tahun berjalan dibanding kinerja tahun lalu untuk periode yang sama.

Perbandingan rencana anggaran ( Target ) dengan realisasi Pendapatan selama triwulan I Tahun Anggaran 2003 apabila dibandingkan dengan rencana anggaran ( Target ) tahapan nampak sebagai berikut :

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

37 UPPD telah memenuhi tahap triwulan I.

Secara kumulatif realisasi penerimaannya sebesar Rp. 97.999.528.340 (115,29% dari tahapan)

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BMKB).

21 UPPD belum memenuhi tahap triwulan I dari 37 UPPD.



Secara komulatif realisasi penerimaannya sebesar Rp. 113.514.576.715,00 (97,65% dari tahapan).

c. Pajak ABT

Secara komulatif 37 UPPD dari rencana anggaran tahap triwulan I sebesar Rp. 1.500.000.000,00 baru terialisir sebesar Rp. 936.421.539,00 (62,43%).

d. Pajak APT

Secara komulatif dari 37 UPPD dari rencana anggaran tahap triwulan I sebesar Rp. 1.000.000.000,00 baru terealisir sejumlah Rp. 39.454.938,00 (3,94%).

2. Perbandingan Kinerja Tahun Anggaran 2003 dibanding kinerja tahun Anggaran 2002 (triwulan I).

Dari perbandingan kinerja triwulan I Tahun Anggaran 2002 dan 2003 nampak sebagai berikut :

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

37 UPPD mengalami kenaikan (jumlah pendapatan maupun jumlah obyek).

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBN.KB I).

11 UPPD mengalami penurunan (Pendapatan maupun jumlah obyek)

c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN.KB II).

10 UPPD mengalami penurunan (Jumlah pendapatan maupun jumlah obyek

Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi :

- a. Kondisi Perekonomian yang berfluktuasi dari AFTA 2003 (ekstern)
- b. Pemahaman dan Kepedulian masyarakat terhadap mekanisme pungutan (ekstern).
- c. Belum maksimalnya intensitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi (pendataan dan tunggakan kendaraan tidak PU, pendapatan / penjarangan Kendaraan Luar Daerah dan Kendaraan Pindah Tangan).
- d. Belum maksimalnya pengendalian pungutan baik dari sisi administrasi maupun operasional/layanan sebagai salah satu bentuk WASKAT guna menjaring sumber pendapatan terkoordinasi.
- e. Masih dalam masa transisi untuk pungutan P2ABT dan P3AP.
  - Kebijakan masalah HAD masih perlu penyesuaian/evaluasi.
  - Keterpaduan pelaksanaan pendataan obyek (schedule/teknis) belum sebagaimana mestinya.
- f. Disamping faktor keterbatasan SDM dan Sumber Daya lain yang masih perlu dicermati.

Perbandingan Rencana Anggaran (target) dengan Realisasi. Realisasi Pendapatan selama triwulan I Tahun Anggaran 2003 apabila dibandingkan dengan rencana anggaran (target) tahapannya, nampak sebagai berikut :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD).

9 UPPD belum memenuhi tahapan triwulan I dari 37 UPPD.

Secara kumulatif realisasi penerimaannya sebesar Rp. 23.823.060,00 (123% dari tahapan).

b. Sumbangan Pihak Ketiga (SP3 Dealer).

34 UPPD belum memenuhi tahapan triwulan I.

Secara kumulatif realisasi penerimaannya sebesar Rp. 1.856.947.750,00 (87,39% dari tahapan).

c. Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan (RTPHH).

2 UPPD belum memenuhi tahapan triwulan I dari 6 UPPD.

Secara kumulatif realisasi penerimaannya sebesar Rp. 1.466.495.925,00 (167 % dari tahapan).

d. Sumbangan Pihak Ketiga (SP3 Kayu).

Realisasi triwulan I hanya tercapai Rp. 692.531.795,00 (13,06 % dari target keseluruhan).

Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi :

1. Belum maksimalnya kegiatan pendataan obyek dan penagihan (baik potensi yang belum terpungut maupun obyek yang sudah terpungut namun belum sesuai dengan potensi dan tariff yang berlaku ) seperti :

Lahan untuk parkir dengan Retribusi Rp.20.000,00/bulan (tariff Rp. 1.000,00/m<sup>2</sup>) berarti luas lahan hanya 20 m<sup>2</sup> (sekitar = 3 x 7 m).

2. Terdapatnya model pungutan retribusi setahun sekali sehingga penerimaan terkonsentrasi pada triwulan tertentu.
3. Ketergantungan pungutan RTPHH terhadap pola pemasaran kayu oleh Perhutani.
4. Belum maksimalnya koordinasi dengan Unit/Instansi Terkait dan pengendalian pungutan (missal : Potensi Pendaftaran Kendaraan Baru oleh Dealer yang belum/lolos terpungut SP3).

Mendasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor : 875.1/0142/2003 tentang Pemberian Kuasa untuk menandatangani Dokumen Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, pada triwulan I Tahun Anggaran 2003 apabila dibandingkan antara realisasi pengeluaran belanja dengan rencana anggaran (plafonisasi) yang ditentukan untuk setiap UPPD, nampak sebagai berikut :

1. Secara kumulatif pada triwulan I Tahun Anggaran 2003 ini, terdapat dua puluh empat (24) UPPD yang realisasi pengeluaran belanjanya melebihi plafonisasi yang telah ditentukan.
2. Realisasi belanja yang melebihi plafonisasi dimaksud meliputi mata anggaran/rekening :
  - a. Biaya Jasa Kantor.....( 3,12%)
  - b. Biaya Cetak dan Pengadaan.....( 8,63%)

- c. Belanja Perjalanan Dinas.....( 31,30%)
  - d. Biaya Pemeliharaan.....( 338,58%)
  - e. Honorarium/upah.....(546,88%)
- (periksa lampiran)

3. Faktor-faktor yang dimungkinkan mempengaruhi hal tersebut :

- a. Meningkatnya besaran satuan biaya kegiatan dan tarip pada Tahun 2003.
- b. Adanya kegiatan duplikasi yang masih bisa disederhanakan/disempurnakan.
- c. Ada kegiatan-kegiatan yang belum direncanakan karena perubahan peraturan perundangan dan penyempurnaan fasilitas/sarana.
  - 1) Kegiatan sosialisasi Perda-perda baru, seperti : Pajak ABT, pajak AP.
  - 2) Rapat Asisten Pola Penatausahaan Keuangan Daerah.
  - 3) Melengkapi kebutuhan penyempurnaan fasilitas layanan (AC dll).
  - 4) Honorarium lelang kayu.

### **C.5. Pola Pelaporan UPPD**

Untuk dapat mengadakan monitoring dan evaluasi secara periodik atas kinerja seluruh jajaran Dinas Pendapatan Daerah, sehingga kinerja yang direncanakan dalam setiap tahun anggaran ini dapat diamankan pencapaiannya, diperlukan sistem pelaporan dari setiap unit/UPPD secara terstruktur, tertib dan tepat waktu serta akurat, agar bisa menjadi bahan pengambilan keputusan yang tepat.

Adapun wujud laporan yang secara periodic harus disampaikan oleh Ka.UPPD :

a. Program Kerja UPPD (tahunan).

Merupakan suatu wujud proses kerja yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama satu tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, kendala yang mungkin dihadapi dan mengarah pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta rencana kegiatan yang diperkirakan dapat dicapai. Program ini harusnya dilaporkan sebelum tahun anggaran berjalan sebagai bagian bottom-up planning, guna mewujudkan program kerja Dinas secara terkonsolidasi. Dari hasil monitoring terdapat 2(dua) UPPD yang menyampaikan Program Kerja baru pada bulan April 2002 (Triwulan II).

b. Laporan Fungsional (bulanan).

Merupakan pertanggung jawaban Pemegang Kas (Pembantu) atas uang yang dikelolanya dalam bulan yang bersangkutan kepada Kepala Dinas dan Pemegang Kas Laporan Fungsional ini ditentukan selambat-lambatnya tanggal 2 pada bulan berikutnya.

c. Laporan Struktural.

Merupakan pertanggung jawaban UPPD atas kinerja yang telah diraih dalam bulan yang bersangkutan sesuai Tupoksinya.

Laporan Struktural ini ditentukan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

d. Laporan Waskat (Triwulan).

Merupakan pertanggung jawaban pimpinan UPPD atas pengembalian dan pengawasan langsung pelaksanaan kegiatan staff, untuk mengamankan tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Waskat sesuai surat Kepala Dinas Nomor : 700/2755 tanggal 1 Juni 1997 ditentuka setiap Triwulan.

e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Tahunan).

Merupakan pertanggungjawaban UPPD atas kinerja yang telah diraih selama 1 tahun yang bersangkutan, sesuai tupoksi dan rencana yang telah ditentukan.

Laporan tahunan yang ditentukan selambat-lambatnya tanggal 5 Februari tahun berikutnya.

f. Laporan on Line (harian).

Merupakan pertanggung jawaban kinerja UPPD atas kinerja dibidang pendapatan daerah pada hari / tanggal yang bersangkutan, melalui fasilitas on line system. Pengiriman data ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari berikutnya.

Dari hasil monitoring sampai dengan akhir bulan Maret seluruh UPPD kecuali Samsat Pembantu Majenang bisa melaksanakan on line data sesuai ketentuan, walaupun untuk akurasi data perlu dievaluasi lebih lanjut.

Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi ketidaktepatan laporan :

1. Keterbatasan SDM baik kuantitatif maupun kualitatif (dalam penguasaan teknologi komputer) di UPPD.
2. Lambatnya arus data/informasi antar Unit/Instansi Terkait.
3. Kerusakan / gangguan perangkat keras / lunak.



4. Belum maksimalnya monitoring dan pengawasan atasan dalam memacu meningkatkan kemampuan dan disiplin laporan.

### **C. 6. Hal –hal yang Perlu Diperhatikan UPPD Dalam menjalankan Fungsinya**

Dari hasil evaluasi sementara capaian pendapatan daerah serta realisasi anggaran belanja selama Triwulan I Tahun 2003 sebagaimana dikemukakan pada Bab terdahulu, maka guna mengamankan Rencana anggaran pendapatan (target) yang telah ditentukan serta mengantisipasi perubahan anggaran, hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk dicermati dan ditindak lanjuti oleh Kepala UPPD adalah sebagai berikut :

1. Tingkatkan intensitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan mengarah pada upaya pelestarian obyek, menjaring obyek baru dari potensi yang ada melalui kegiatan:
  - a. Pendataan Kendaraan Bermotor tidak PU yang jumlahnya cukup besar baik secara door to door maupun surat pemberitahuan untuk menjaring potensi PKB maupun BBNKB II melalui program blokir. ....
  - b. Efektifkan pengiriman super KPKB sebagai sarana mengingatkan kepada wajib pajak sekaligus menjaring potensi BBNKB II melalui program blokir.

- c. Aktifkan upaya pendataan Kendaraan Bermotor Luar Daerah melalui berbagai pendekatan yang efektif disesuaikan kondisi Daerah.
  - d. Adakan pendekatan dengan Broker/Toko Kendaraan Bermotor.
  - e. Efektifkan urutan baru dengan pendekatan koordinatif, konsultatif dan jemput bola.
2. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mengarah kepada kecepatan, ketepatan dan kenyamanan serta transportasi layanan untuk memotivasi masyarakat membayar Pajak/Retribusi Daerah.
  3. Tingkatkan sistim pengendalian pungutan dengan pendekatan normative, proporsional namun lugas, sebagai salah satu bentuk Waskat untuk memacu peningkatan pendapatan (seperti lolosnya potensi pendaftaran kendaraan bermotor baru SP3, menurunnya obyek / penerimaan BBN.KB II dll).
  4. Tingkatkan koordinasi dengan Instansi terkait untuk mewujudkan sinergi kerja yang mendorong peningkatan Pendapatan Daerah.
  5. Sosialisasikan setiap pungutan secara aktif dan terus menerus kepada masyarakat melalui berbagai kesempatan dan media yang ada.
  6. Administrasikan setiap kegiatan secara tertib dan laporkan sesuai ketentuan yang berlaku.
  7. Motivasi dan berdayakan staf untuk disiplin dan produktif dalam mendukung Visi dan Misi tugas Dinas, dengan pendekatan keteladanan.

## D. Diskusi

Untuk melaksanakan dan menggali PAD dalam hal ini Devas ( 1989) memberikan kriteria yang lebih rinci untuk menetapkan kelayakan suatu pajak. Sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menilai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut layak adalah sebagai berikut :

### 1. Hasil perolehan pajak meliputi :

- Hasilnya pasti dan dapat diprediksi. Hasil pajak hendaknya relatif stabil, tidak berfluktuasi dari tahun ke tahun agar mudah dalam melakukan perencanaan belanja
- Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan kenaikan pendapatan
- Perbandingan antara biaya pungut dengan hasil pajak kecil

### 2. Keadilan ( *equity* )

- dasar pengenaan pajak ( *tax base* ) dan kewajiban pajak harus jelas tidak bersifat arbitrer
- *Horizontal equity* Pajak yang dilakukan harus menciptakan keadilan horisontal,yaitu mereka yang kondisi ekonominya sama memiliki beban pajak yang sama

- *Vertical equity* Beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar, yang kaya harus membayar pajak lebih tinggi dari pada yang miskin.
  - *Benefit principle*, mereka yang menikmati fasilitas publik secara lebih baik harus membayar pajak lebih tinggi
3. Daya Guna Ekonomi ( *Economic efficiency / economic neutrality* )
- Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara produktif dan tidak mengganggu perekonomian. Sistem perpajakan hendaknya memberikan netralitas ekonomi, sehingga mengurangi distorsi ekonomi
4. Kemampuan melaksanakan ( *ability to implement* )
- Adanya *political acceptability* untuk menerapkan pajak
  - Terdapat dukungan kapasitas administrasi dan skill aparat pajak yang memadai
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah ( *suitability as a local revenue source* )
- Harus jelas pemerintah daerah mana yang harus menerima pajak, sebagai contoh, pajak penghasilan seharusnya dibayarkan kepada pemerintah daerah tempat dimana orang tersebut bekerja atau tempat tinggal wajib pajak

- Kedudukan objek pajak jelas agar pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain

6. Pengaruh tempat ( lokasi) terhadap beban pajak ( *location reponses to taxation* )

Jika jenis pajak atau tarif pajak berbeda – beda untuk tiap daerah, maka pembayar pajak cenderung berusaha untuk mengurangi beban pajak. Idealnya, pajak daerah dapat meminimalkan distorsi yang menyebabkan masyarakat dan pelaku bisnis meninggalkan suatu daerah

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

1. Hasil perhitungan perbandingan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB ) dengan PDRB berdasarkan harga konstan selama lima tahun yang merupakan tingkat upaya pajak ( *tax effort* ) PKB dan BBNKB pada UPPD kabupaten Blora terbukti sangat rendah ( 0,3816 % ) dan ( 0,4120 % ). Namun apabila kita amati dalam perkembangan dari tahun ke tahun nampak mengalami peningkatan. Secara jelas dapat dikatakan bahwa tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Blora mengalami peningkatan yang cukup berarti bagi peningkatan upaya pajak daerah terutama PKB dan BBNKB . Dari hal ini pula dapat dikatakan bahwa upaya pajak PKB dan BBNKB di Kabupaten Blora dapat diandalkan dalam upaya memberi kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Propinsi Jawa Tengah.
2. Hasil perhitungan perbandingan antara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB ) pada UPPD Kabupaten Blora dengan potensi pajak selama lima tahun

yang merupakan tingkat hasil guna ( efektivitas ) PKB dan BBNKB di Kabupaten Blora terbukti sangat tinggi ( 106,8 % ) dan ( 126,24 % ) . Apabila kita amati perkembangan tiap tahunnya, mengalami peningkatan yang signifikan. Secara jelas dapat dikatakan bahwa tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Blora mengalami peningkatan yang cukup berarti bagi peningkatan efektivitas pajak daerah terutama PKB dan BBNKB . Dari hal ini pula dapat dikatakan bahwa efektivitas pajak PKB dan BBNKB di Kabupaten Blora dapat diandalkan dalam upaya memberi kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Propinsi Jawa Tengah.

3. Hasil perhitungan perbandingan antara biaya pemungutan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB ) pada UPPD kabupaten Blora dengan potensi pajak selama lima tahun yang merupakan tingkat daya guna (efisiensi ) PKB dan BBNKB terbukti sangat rendah ( 0,084 % ) dan (0,093 % ) . Namun apabila kita amati dalam perkembangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Secara jelas dapat dikatakan bahwa tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Blora mengalami peningkatan yang cukup berarti bagi peningkatan efisiensi pajak daerah terutama PKB dan BBNKB . Dari hal ini pula dapat dikatakan bahwa efisiensi pajak PKB dan BBNKB di Kabupaten Blora

dapat diandalkan dalam upaya memberi kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Propinsi Jawa Tengah.

4. Apabila kita cermati dari hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan secara umum bahwa nampak adanya kontribusi upaya pajak ( *tax effort* ) , hasil guna ( efektivitas ) dan daya guna ( efisiensi ) Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) pada UPPD Kabupaten Blora dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Jawa Tengah. Dari hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan anggaran daerah baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota yang akan dimanfaatkan pada kegiatan pembangunan bagi masyarakat.
5. Apabila diamati pada tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pajak khususnya dari PKB dan BBNKB pada UPPD Kabupaten Blora memang dirasa sangat kurang memadai pada upaya peningkatan PAD Propinsi Jawa Tengah. Dengan diberlakukannya Perda Propinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Perda Propinsi Jawa Tengah No. 4 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ), berkaitan pula dengan AFTA diharapkan mampu untuk meningkatkan PAD Propinsi Jawa Tengah. Dengan adanya AFTA, harga kendaraan bermotor *import* mengalami penurunan yang tentunya akan membawa implikasi pada meningkatnya daya beli masyarakat. Apabila pemilikan kendaraan bermotor ini



meningkat maka penerimaan PKB dan BBNKB meningkat pula. Konsekuensi lebih jauh adalah peningkatan PAD Propinsi Jawa Tengah.

6. Perkembangan sesudah Perda Propinsi Jawa Tengah No.3 dan 4 tahun 2002, dilihat dari hasil analisis bahwa perkembangan banyaknya objek maupun realisasi penerimaan, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dapat pula diprediksikan peningkatan ini akan berjalan terus dalam kurun waktu lama. Hal tersebut tentunya merupakan prospek bagi realisasi penerimaan yang diharapkan meningkat. Apabila kita telaah penyebab adanya prospek peningkatan realisasi pendapatan dari PKB dan BBNKB adalah banyaknya objek kendaraan baru dan mutasi dari luar daerah Kabupaten Blora yang melakukan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor. Perkembangan dan prospek pada wilayah kerja UPPD Kabupaten Blora inilah yang diharapkan akan dapat terus meningkatkan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Propinsi Jawa Tengah.

## **B. Saran – Saran**

1. Mengingat sangat pentingnya anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi daerah, upaya pemanfaatan potensi pendapatan harus di upayakan optimalisasinya melalui upaya pajak ( *tax effort* ), peningkatan hasil guna ( efektivitas ) dan daya guna ( efisiensi ) pajak .

2. Upaya optimalisasi pajak dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), dapat dilakukan melalui perencanaan dan penyusunan kegiatan yang harus terus mendapat perhatian dan pertimbangan yang lebih seksama dengan mengingat berbagai potensi dan kendala yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat memenuhi sasaran target yang ditentukan.
3. Keberhasilan dari pemenuhan target penerimaan di dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat terlepas dari kualitas dan kemampuan pelaksanaannya. Dalam hal ini UPPD Kabupaten Blora, perlu terus menerus meningkatkan lagi kemampuannya dengan memeberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta kursus – kursus. Disamping itu juga ditingkatkan pembinaan dibidang disiplin pegawai dan kesadaran akan tugasnya yang sangat penting, guna kelangsungan kegiatan pembangunan di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, Mc Colin, Amal Ichlasul, 2002 : **Hubungan Pusat – Daerah Dalam Pembangunan**, Cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1996 : **Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek**, Cetakan Kesepuluh, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1999 : **Ekonomi Pembangunan**, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
- Baker, A. 1986. **Metodologi Kualitatif**. Fakultas Pasca sarjana UGM. Yogyakarta
- Bambang, W, 1993 : **Manajemen Perusahaan**, Cipta Karya, Bandung
- Campbell, H.J. terj. Zarkasi, M. 1997. **Psikologi Manajemen**. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Davey, Kenneth, 1988 : **Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga** (terjemahan Aminullah, dkk) UI-Press, Jakarta.
- Devas, N, Binder B, Both, A, Davey, K, Kelly, .1989: **Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia**, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta.
- Dhiatayakinant, K, 1989: *Issues In Financial Structure and Management : The Case of Bangkok Metropolis, Regional Development Dialogue*, Vol . 1. No. 1 Spring, 111-136.
- Faisal, S. 1991 : **Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi**. YA3 Malang
- Hadi, Sutrisno, 1984 : **Metodologi Research**, Jilid 1, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Hidayat, Syarif, 2000 : **Dilema Otonomi Daerah : Perluasan Wewenang Daerah VS Wewenang Elite Daerah**, Analisis CSIS, Jakarta.
- Indrawijaya, A.I. 1989. **Perubahan dan Pengembangan Organisasi**. Sinar Baru. Bandung

- Insukindro, Mardiasmo , Widayat W, Wihanana, KJ, Halim A, Suprihanto J, Purnomo B, 1994 : **Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**, KKD, FE-UGM, Yogyakarta.
- Kirana Jaya W, Baswir R, Bastian I, 2000 : **Kajian Profil Daerah Tingkat II ditinjau Dari Aspek Potensi Penerimaan Daerah**, Laporan Akhir Kejasama Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah dengan PAU-SE UGM Yogyakarta.
- Koswara, E. 2000 : **Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 : Suatu Telaahan menyangkut Kebijaksanaan, Pelaksanaan Dan Kompleksitasnya**, Analisis CSIS, Jakarta. -
- Kuncoro, 1995 : **Pengantar Manajemen (Konseptual dan Perilaku)** Unibraw Malang
- Lubis & Huseini, 1987 : **Pengantar Manajemen (Konseptual dan Perilaku)** Unibraw Malang
- Maki, 1995 : **Sosiologi Organisasi**. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Mangkoesoebroto, 1998 : **Ekonomi Publik**, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo , 2000: **Refomasi Kelembagaan dan Paradigma Baru, Perencanaan Strategik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pendekatan Makro** , Modul Program Penataran manajemen Sektor Strategis, Kerjasama Direktorat Jendral PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis UGM , Yogyakarta.
- Marshall, C & Rossman, G.B. 1989. **Mendesain Penelitian Kualitatif**. Univ. Pennsylvania. USA
- Maxwell, J.C. terj. Saputra, 1999. A. **Laws of Leadership**. Interaksara. Jakarta
- Milles, M.B. terjemahan Rohidi R.C. 1992. **Analisa Data Kualitatif**. UI Press. Jakarta
- Moleong, J.L. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT Remaja Rosdakarya. Bandung

- Mulyono : 1990 : **Perilaku Organisasi**. Sinar Baru . Bandung
- Nopirin, 1996 : **Upaya Peningkatan Pajak Daerah**, Kanisius, Yogyakarta.
- Pamudji , S : 1982 : **Pembinaan Perkotaan di Indonesia**, Tinjauan Dari Aspek Administrasi Pemerintahan, Ichtiar Bau, Jakarta.
- Poerwandari,E.K. 1998. **Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi**. LPSP3 Fak.Psikologi UI Jakarta
- Ravianto, J, 1997 : **Produktivitas dan Mutu Kehidupan**, SIUP, Jakarta.
- Radianto, 1997: **Organisasi dan Permasalahannya**, Bumi Aksara , Jakarta
- Roy Bahl, 2001 **Pengelolaan Sumber Daya Manusia**. Bumi Aksara. Jakarta
- Saragih, J, panglima, 1996 : **Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan**, majalah Perencanaan Pembangunan, No : 6, 36-43.
- Shah , Anwar,1997 : *Balance , Accountability and Responsiveness, Lesson About Decentralization, The World Bank Conference on Evaluation and Development*, The World Bank, Washington DC.
- Siagian , 1983: **Manajemen Sumber Daya Manusia**. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Sidik 2002: **Pengelolaan Organisasi**, Bumi Aksara, Jakarta
- Singarimbun, Masri, Effendi, Sofyan, 1995 : **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta.
- Sinungan, M. 2000 : **Sosiologi Organisasi**. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Soewargono, 1996 : **Kebijaksanaan Penyediaan Pelayanan Publik Dalam Sistem Desentralisasi Multi Tingkat** , Jurnal Ilmu Pemerintahan , Edisi ; 3, 49-58.
- Soetrisno, op R. Cit, 1997. **Psikologi Manajemen**. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Stoner, **Foundations of Behavioral Research**. Holt Rinehard and Winston.NY

Umar, Asri, 2000 : **Kondisi Perpajakan ( *Tax Sharing* ) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Konteks, manajemen Otonomi Daerah, Vol. 1. No. 3, 13-15.**

Widodo, S. Triyanto, 1993 : **Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia, Cetakan Ketiga, Kanisius, yogyakarta.**

Weiss, John, 1995 : ***Economic Policy in Developing Countries : The Reform Agenda*, Prentice Hall, London.**